



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES



Hj. IDZA PRIYANTI, SE., MH
BUPATI BREBES



NARJO, SH., MH
WAKIL BUPATI BREBES

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KABUPATEN BREBES TAHUN 2020

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHU 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(L K j I P)
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2020**

**BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Brebes Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substansif Laporan Kinerja ini merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Brebes.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2020 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes, hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Good Governance dan Clean Government. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Brebes tidak terlepas dari kerjasama dan kerjakeras semua pihak yaitu masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusak kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2020 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2021 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.



Brebes, Maret 2021

BUPATI BREBES

IDZA PRIYANTI, SE, MH.

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Brebes berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan berorientasi kepada hasil (Result Oriented Government) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diujikan dan diandalkan.

Tahun 2020 merupakan tahun ke-3 dari RPJMD 2017 – 2022, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022.

Mengacu pada RPJMD Kabupaten Brebes tersebut, maka capaian sasaran dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut :

❖ Misi I

Misi I terdapat 2 sasaran dan 3 indikator kinerja dengan rata – rata capaian sebesar 96,84 % kategori sangat berhasil.

❖ Misi II

Misi II terdapat 7 sasaran dan 11 indikator kinerja dengan rata – rata capaian sebesar 101,96 % kategori sangat berhasil.

❖ Misi III

Misi III terdapat 7 sasaran dan 9 indikator kinerja dengan rata – rata capaian sebesar 143,07% kategori sangat berhasil.

❖ Misi IV

Misi IV terdapat 5 sasaran dan 6 indikator kinerja dengan rata – rata capaian sebesar 134,34 % kategori sangat berhasil.

❖ Misi V

Misi V terdapat 3 sasaran dan 3 indikator kinerja dengan rata – rata capaian sebesar 100,00 % kategori sangat berhasil.

❖ Misi VI

Misi VI terdapat 3 sasaran dan 13 indikator kinerja dengan rata – rata capaian sebesar 128,24% kategori sangat berhasil.

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana diatas, hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 27 Sasaran yang mencakup 45 indikator sasaran, diketahui bahwa tercapai nilai 114,23 % dengan kategori **sangat berhasil**.

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN ANGGARAN 2020**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Brebes untuk tahun anggaran 2020 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Brebes, Maret 2021



**Plt. Inspektur Daerah
Kabupaten Brebes**
ROFIQ QOIDUL ADZAM, SH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641227 199103 1 007

CHECKLIST REVIU

No.	Pernyataan	Check List	
I.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah	Y
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja	Y
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai	Y
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	Y
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan	Y
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	Y
II.	Mekanisme Penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	Y
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	Y
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj	Y
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data / informasi disetiap unit kerja	Y
		5. Data / informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	Y
		6. Analisis / penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait	Y
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya	Y
III.	Substansi	1. Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	Y
		2. Tujuan / sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	Y
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	Y
		4. Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam Indikator Kinerja	Y
		5. Tujuan / sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	Y

No.	Pernyataan	Check List
	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	Y
	8. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja telah cukup mengukur tujuan / sasaran	Y
	9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	-
	10. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja telah SMART	Y

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Pernyataan Telah di Reviu oleh Inspektorat Kabupaten Brebes	v
Cek List Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	vi
Daftar isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Kabupaten Brebes	2
C. Susunan Organisasi Perangkat Daerah	20
D. Permasalahan Utama Kabupaten Brebes Tahun 2020	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
A. Perencanaan Kinerja	23
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	31
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020	33
A. Pengukuran Kinerja	33
B. Capaian Kinerja Tahun 2020	35
C. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2020	44
D. Realisasi Anggaran	96
BAB IV PENUTUP	101
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
➤ PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020	
➤ REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian laporan kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

B. Gambaran Umum Kabupaten Brebes

1. Kondisi Geografis

Kabupaten Brebes merupakan wilayah administrasi bagian dari Provinsi Jawa Tengah yang memiliki letak strategis karena berada di wilayah barat Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat. Secara astronomi, Kabupaten Brebes berada di 6044'-7021' Lintang Selatan dan antara 108041'-109011' Bujur Timur dengan bentuk memanjang dari utara ke selatan sejauh 87 km dan dari barat ke timur sejauh 50 km terdapat garis pantai sepanjang 55 km yang membentang dari Kecamatan Losari sampai dengan Kecamatan Brebes dan luas wilayah laut 12 mil dari darat mencapai 1.036,80 km². Luas Kabupaten Brebes tercatat 1.769,62 km².

Secara geografis Kabupaten Brebes terletak antara 6°44'-7°21' Lintang Selatan dan antara 108°41' - 109°11' Bujur Timur dengan bentuk memanjang dari utara ke selatan sepanjang 87 km dan dari barat ke timur sepanjang 50 km.

Adapun batas administrasi Kabupaten Brebes yaitu:

Batas Wilayah	Kabupaten/ Kota	Kecamatan Yang Berbatasan
- Timur :	Kota Tegal Kabupaten Tegal	Brebes. Jatibarang, Songgom, Larangan, Tonjong.
- Selatan :	Kabupaten Banyumas Kabupaten Cilacap	Sirampog, Paguyangan. Bantarkawung, Salem.
- Utara :	Laut Jawa	Losari, Tanjung, Bulakamba, Wanasari, Brebes
- Barat :	Kabupaten Cirebon Kabupaten Kuningan	Losari. Banjarharjo, Salem.

Tabel 1.1.
Pembagian wilayah administrasi dan luas wilayah per kecamatan

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH KELURAHAN	LUAS WILAYAH (km ²)	()
1	Salem	21	-	167,21	9,45
2	Bantarkawung	18	-	208,18	11,76
3	Bumiayu	15	-	82,09	4,64
4	Paguyangan	12	-	108,17	6,11
5	Sirampog	13	-	74,19	4,19
6	Tonjong	14	-	86,55	4,89
7	Larangan	11	-	160,25	9,06
8	Ketanggungan	21	-	153,41	8,67
9	Banjarharjo	25	-	161,75	9,14
10	Losari	22	-	91,79	5,19
11	Tanjung	18	-	72,09	4,07
12	Kersana	13	-	26,97	1,52
13	Bulakamba	19	-	120,36	6,80
14	Wanasari	20	-	75,34	4,26
15	Songgom	10	-	52,65	2,98
16	Jatibarang	22	-	36,39	2,06
17	Brebes	18	5	92,23	5,21
Jumlah		292	5	1.769,62	100

Sumber : Kabupaten Brebes Dalam Angka 2020

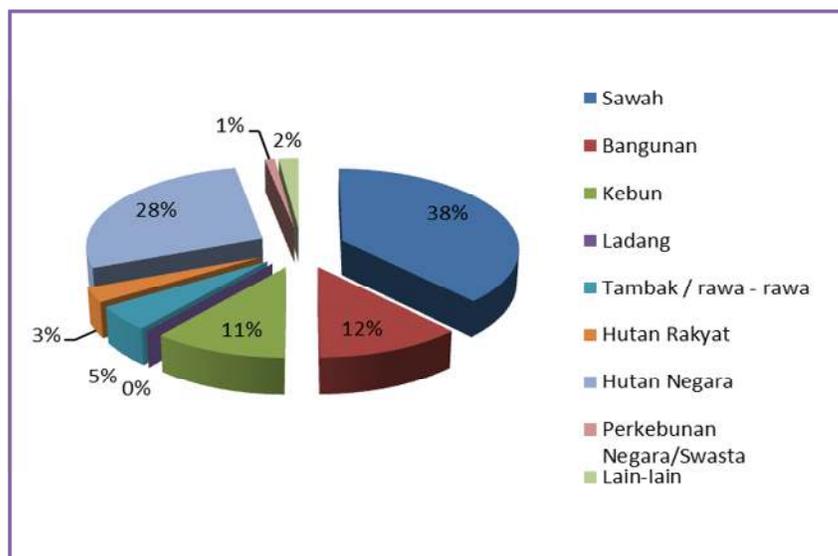
Topografi Wilayah Kabupaten Brebes bervariasi yaitu ketinggian wilayah. Luas wilayah dengan kondisi topografi sangat rendah seluas 84.262,35 hektar atau sekitar 48 dari total keseluruhan luas wilayah Kabupaten Brebes. Untuk wilayah dengan kondisi topografi tinggi seluas 20.203,67 hektar atau sekitar 11 dari keseluruhan wilayah Kabupaten Brebes yang tersebar di 6 kecamatan yakni Kecamatan Salem, Bantarkawung, Paguyangan, Sirampog, Ketanggungan, dan Banjarharjo. Dilihat dari ketinggiannya dari permukaan laut, wilayah kecamatan yang tertinggi letaknya adalah Kecamatan Sirampog dengan ketinggian 875 meter di atas permukaan laut (mdpl), Kecamatan Salem dengan ketinggian 500 mdpl, dan Kecamatan Paguyangan dengan ketinggian 342 mdpl. Sedangkan untuk Kecamatan Larangan, Kecamatan Banjarharjo, dan Kecamatan Ketanggungan tingginya

berkisar antara 23 mdpl, 22 mdpl, dan 17 mdpl. Selain itu wilayah kecamatan lain rata-rata bernilai 1-5 mdpl yang tersebar di wilayah Kecamatan Losari, Tanjung, Kersana, Bulakamba, Wanasari, Songgom, Jatibarang, dan Brebes yang memiliki wilayah pesisir di bagian utara.

Lahan di wilayah Kabupaten Brebes pemanfaatan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk kemiringan kurang dari 8 (datar) dapat digunakan untuk penggunaan tanaman lahan basah, yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Brebes.
2. Kemiringan antara 8-15 (sedang atau berombak), masih dapat digunakan untuk penggunaan lahan pertanian, khususnya pertanian tanaman lahan kering yang meliputi seluruh kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Brebes.
3. Kemiringan antara 15-45 (berat atau berbukit), dapat digunakan untuk tanaman keras (tahunan) baik dengan tanaman produksi maupun sebagai tanaman buffer, kondisi ini hampir di seluruh wilayah Kabupaten Brebes bagian selatan meliputi Kecamatan Salem, Bantarkawung, Paguyangan, Bumiayu, Sirampog, Larangan, Banjarharjo, Jatibarang, dan Tonjong.
4. Kemiringan lebih dari 45 (sangat berat), kemungkinan longsor cukup tinggi dan diarahkan sebagai kawasan lindung, Kawasan ini terdapat di Kecamatan Salem, Bantarkawung, Bumiayu, Paguyangan, Sirampog, Tonjong, Larangan, Ketanggungan, dan Banjarharjo.

Grafik 1.1.
Penggunaan Lahan di Kabupaten Brebes



2. Kondisi Demografis

Penduduk Kabupaten Brebes menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes akhir semester 2 Tahun 2020 mencapai 1.961.391 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Masing-masing jumlahnya adalah 995.895 jiwa penduduk laki-laki atau sebesar 50,77 dan 965.496 jiwa penduduk perempuan atau sebesar 49,23.

Jumlah penduduk Kabupaten Brebes bila di lihat per Kecamatan sangat bervariasi, distribusi penduduk Kabupaten Brebes belum tersebar secara merata. Kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Brebes 182.228 jiwa (9,29), Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling kecil adalah Kecamatan Salem sebanyak 63.036 jiwa atau (3,21).

Tabel 1.2
Penduduk Kabupaten Brebes
menurut Kecamatan, Jenis Kelamin dan Sex Ratio Tahun 2020

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)			Sex Ratio	Luas* Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah			
Salem	31.965	31.071	63.036	102,87	167,21	377
Bantarkawung	52.156	49.918	102.074	104,48	208,18	490
Bumiayu	56.833	54.568	111.401	104,15	82,09	1.357
Paguyangan	56.734	54.086	110.820	104,89	108,17	1.024
Sirampog	35.448	33.893	69.341	104,58	74,19	935
Tonjong	38.960	37.811	76.771	103,03	86,55	887
Larangan	78.470	76.728	155.198	102,27	160,25	968
Ketanggungan	72.563	70.451	143.014	102,99	153,41	932
Banjarharjo	64.177	63.550	127.727	100,98	161,75	790
Losari	69.221	67.465	136.686	102,60	91,79	1.489
Tanjung	52.725	50.934	103.659	103,51	72,09	1.438
Kersana	33.464	32.825	66.289	101,94	26,97	2.458
Bulakamba	92.284	88.560	180.844	104,20	120,36	1.503
Wanasari	81.517	78.215	159.732	104,22	75,34	2.120
Songgom	42.827	41.947	84.774	102,09	52,65	1.610

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)			Sex Ratio	Luas* Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah			
Jatibarang	44.410	43.387	87.797	102,35	36,39	2.413
Brebes	92.141	90.087	182.228	102,28	92,23	1.976
Jumlah	995.895	965.496	1.961.391	103,14	1.769,62	1.339,00

Sumber data: Dindukcapil Kabupaten Brebes, 2020

Selain itu, angka kepadatan penduduk di Kabupaten Brebes mencapai 1.339 jiwa/km² yang artinya disetiap 1 km² didiami oleh sekitar 1.339 orang penduduk Kabupaten Brebes. Kepadatan paling tinggi ada di Kecamatan Kersana, sedangkan kepadatan penduduk paling rendah ada di Kecamatan Salem.

3. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian integral dari pembangunan yang dijadikan indikator kemajuan suatu bangsa. Pembangunan suatu bangsa tidak dapat mengandalkan dari sumber daya alam semata, maka usaha dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia bersifat mutlak, dimana pendidikan adalah salah satu faktor untuk meningkatkan sumber daya manusia tersebut. Peningkatan di bidang pendidikan akan berimbas pada kualitas penduduk yang semakin baik. Untuk dapat mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah dengan beberapa indikator seperti Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) serta Angka Partisipasi Murni (APM).

Penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Brebes didukung oleh ketersediaan fasilitas pendidikan sejak tingkat pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi. Data tentang perkembangan fasilitas pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Brebes
Tahun 2018 – 2020

Tingkat Pendidikan	2018		2019		2020	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
TK/RA/ABA	3	583	3	583	3	583
SD	870	26	870	26	869	26
MI	7	207	7	207	7	207
SDLB	1	1	1	1	1	1
SMP	81	73	81	73	81	75
MTs	4	95	4	95	4	95
SMA	17	14	17	14	17	14
SMK	6	88	6	88	6	88
MA	2	28	2	28	2	28
PT/Akademi	-	6	-	6	-	6

Sumber data : Profil Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Brebes Tahun 2020

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan tertentu per 10.000 jumlah penduduk usia jenjang pendidikan tersebut. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pada jenjang pendidikan tersebut. Rasio ketersediaan sekolah dihitung dari perbandingan jumlah sekolah jenjang tertentu dibagi jumlah penduduk kelompok usia tertentu yang sesuai dikali 10.000.

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Perhitungan APK yaitu jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibagi jumlah penduduk kelompok usia sekolah dikali 100. Makin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan atau semakin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah ditingkat pendidikan tertentu. Di jenjang pendidikan SD/ MI dan SMP/ MTs mengalami tren penurunan. Pada tahun 2016 APK pada jenjang SD/ MI mencapai 100,59 sedangkan pada tahun 2020 mencapai 98,17. Pada jenjang

SMP/ MTs APK tahun 2016 mencapai 88,58 dan pada tahun 2020 mencapai 88,22. Hanya pada jenjang SMA/ SMK/ MA APK mengalami kenaikan, pada tahun 2016 mencapai 57,38 dan pada tahun 2020 mencapai 68,85.

Isu-isu strategis pembangunan bidang pendidikan, pemuda, dan olahraga yang akan ditangani dalam Rencana Strategis Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut ini.

- 1) *Penyelenggaraan layanan pendidikan (PAUD, pendidikan dasar, dan pendidikan masyarakat) belum sesuai dengan standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan.*

Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjamin mutu pendidikan, layanan pendidikan wajib memenuhi standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu isu strategis yang harus diselesaikan di Kabupaten Brebes selama lima tahun ke depan adalah pemenuhan standar nasional pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pendidikan baik pada jenjang PAUD, pendidikan dasar, maupun pada pendidikan masyarakat.

- 2) *Pelaksanaan kurikulum termasuk pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan masih perlu penguatan kembali.*

Kurikulum 2013 yang telah mengintegrasikan pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan, masih perlu penguatan baik dari proses penyusunan dokumen kurikulum, pelaksanaan kurikulum, maupun supervise pelaksanaan kurikulum tersebut. Kapasitas guru untuk mengimplementasikan kurikulum 2013 perlu diperhatikan dengan baik. Selain itu fungsi supervisi dari kepala sekolah dan pengawas sekolah juga perlu perbaikan.

- 3) *Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia 7 - 15 tahun belum mencapai 100.*

Kewajiban pemerintah daerah untuk menuntaskan pendidikan dasar telah lama dicanangkan sejak Undang-Undang 20 Tahun 2003 mengamanatkan program wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun. Akan tetapi, diKabupaten Brebes masih terdapat anak usia sekolah 7 – 15 tahun yang belum mengakses layanan pendidikan dasar. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, diperlukan perumusan program dan kegiatan yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat yang belum mengakses layanan pendidikan.

- 4) *Lemahnya sistem penilaian pendidikan.*

Ujian sebagai sistem penilaian pendidikan yang dikembangkan oleh pemerintah diharapkan dapat memberikan gambaran yang sebenarnya tentang proses pembelajaran, dan kemampuan siswa untuk dapat menerima pembelajaran. Dengan kata lain, sistem penilaian pendidikan yang baik dapat secara tepat mencerminkan hasil belajar siswa dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan proses pembelajaran pada masa yang akan datang.

- 5) *Kapasitas dan kualitas layanan pendidikan masyarakat yang masih rendah.*

Baik secara kapasitas maupun kualitas, layanan pendidikan masyarakat masih perlu ditingkatkan. Layanan pendidikan masyarakat bersifat strategis sebagai salah satu alternatif bagi masyarakat yang tidak memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan formal.

- 6) *Data buta aksara belum mutakhir.*

Diperlukan basis data buta aksara yang valid sebagai salah satu bahan masukan yang penting untuk menentukan pelaksanaan kegiatan intervensi penuntasan buta aksara. Tidak hanya sebatas data yang berkaitan dengan jumlah penduduk buta aksara, tetapi data valid tentang profil pribadi penduduk buta aksara juga diperlukan.

- 7) *Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan masih perlu ditingkatkan.*

Profesionalisme guru dan tenaga kependidikan dapat dinilai dari penguasaan terhadap kompetensi yang dipersyaratkan untuk menjadi seorang guru dan tenaga kependidikan. Kompetensi guru masih menjadi isu yang perlu ditangani mengingat persentase guru yang memperoleh nilai standar hasil uji kompetensi guru masih rendah. Dengan meningkatnya profesionalisme guru dan tenaga kependidikan diharapkan kurikulum yang telah dipersiapkan dapat berjalan dengan baik pada proses pembelajaran.

- 8) *Kurang meratanya pendistribusian guru dan tenaga kependidikan pada semua jenjang pendidikan.*

Masih berkaitan dengan guru dan tenaga kependidikan, isu strategis selanjutnya adalah pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan pada semua jenjang pendidikan. Diharapkan tidak terdapat kesenjangan yang cukup jauh antara satuan pendidikan yang berada di perkotaan dengan satuan pendidikan yang berada di pinggiran atau pedesaan dalam hal pemenuhan jumlah guru dan tenaga kependidikan. Selain itu diperlukan juga pemerataan distribusi guru sesuai dengan mata pelajaran khususnya pada jenjang SMP.

- 9) *Kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan masih rendah.*

Isu strategis yang berkaitan dengan kesejahteraan pegawai adalah masih rendahnya kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan yang berstatus non pegawai negeri sipil. Dengan beban tugas dan tanggung jawab yang sama dengan guru dan tenaga kependidikan yang berstatus pegawai negeri sipil, para guru dan tenaga kependidikan yang berstatus non pegawai negeri sipil perlu diperhatikan tingkat kesejahtraannya. Walaupun tentu saja dasar peningkatan kesejahteraan tersebut dengan batasan kriteria tertentu baik dari segi masa kerja, kompetensi, maupun beban mengajarnya.

10) *Jiwa kewirausahaan yang dimiliki oleh generasi muda masih rendah.*

Generasi muda sebagai salah satu aset pembangunan yang strategis perlu diberdayakan untuk menjadi salah satu motor penggerak roda pembangunan. Dengan kemampuan wirausaha yang baik diharapkan pemuda dapat menjadi pemuda yang produktif dan tidak menjadi beban bagi masyarakat mengingat spektrum penduduk yang didominasi oleh penduduk dalam usia produktif (pemuda).

11) *Masih kurangnya pembinaan terhadap organisasi kepemudaan, kepramukaan, dan keolahragaan.*

Organisasi kepemudaan, kepramukaan, dan keolahragaan diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam penyelenggaraan pembangunan. Organisasi tersebut dapat memberikan masukan dalam penentuan arah kebijakan pembangunan pemuda dan olahraga. Organisasi tersebut juga sebagai wahana bagi masyarakat untuk mengembangkan diri baik di bidang kepemudaan, kepramukaan, maupun keolahragaan.

12) *Kurangnya Frekuensi penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, kepramukaan, dan keolahragaan.*

Untuk meningkatkan kualitas kepemudaan, kepramukaan, dan keolahragaan perlu dipacu dengan lebih meningkatnya frekuensi pelaksanaan kegiatan kepemudaan, kepramukaan, dan keolahragaan yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun atas prakarsa mandiri masyarakat.

4. Kondisi Kesehatan

Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat ditunjang oleh fasilitas kesehatan, hal ini akan terwujud apabila adanya dukungan pemerintah dan swasta. Pada tahun 2020 jumlah rumah sakit di Kabupaten Brebes mencapai 13 unit, dan diperkirakan pada tahun 2021 pembangunan rumah sakit di

Kecamatan Ketanggungan akan selesai sehingga akan bertambah menjadi 14 unit rumah sakit di Kabupaten Brebes.

Fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Brebes terdiri dari fasilitas pelayanan kesehatan dasar yaitu Puskesmas dan jaringannya serta fasilitas kesehatan rujukan. Disamping pelayanan kesehatan oleh Pemerintah, partisipasi sektor swasta juga semakin meningkat terutama dalam pelayanan kesehatan rujukan. Fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari Puskesmas Induk, Pustu, PKD, Balai pengobatan swasta, RS khusus, Rumah Bersalin, RSU Pemerintah dan RSU Swasta. Selengkapny jumlah fasilitas kesehatan tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Jumlah Sarana Kesehatan Kabupaten Brebes

No.	Uraian	Jumlah (Unit)
1.	Rumah Sakit Umum Daerah	2
2.	Rumah Sakit Umum Swasta	9
3.	RSIA	2
4.	Puskesmas Induk	38
5.	Puskesmas Pembantu	58
6.	Klinik / Praktek Dokter	70
7.	Puskesmas Keliling	56
8.	Poliklinik	22
9.	Polindes	236
10.	Posyandu	1.760

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2020

Isu strategis adalah permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, dari dinamika internasional, nasional dan regional yang mempengaruhi Kesehatan, sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

- a. Umur Harapan Hidup Kabupaten Brebes masih dibawah rata-rata UHH Provinsi Jawa Tengah. Rendahnya UHH di Kabupaten Brebes disebabkan karena :
1. Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), hal ini disebabkan belum semua Ibu hamil mendapatkan pelayanan ANC (Antenatal Care) sesuai dengan standar, masih kurangnya tenaga kesehatan yang berkompeten terhadap penanganan ibu hamil risiko tinggi, belum semua ibu hamil mendapatkan pendampingan, dan belum maksimalnya sistem informasi rujukan persalinan.
 2. Masih tingginya Angka Kematian Bayi Baru Lahir (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA), hal ini disebabkan karena
 - a) belum semua bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai standar,
 - b) masih kurangnya penanganan neonatus komplikasi (BBLR dan asfeksia),
 - c) masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan dasar dan rujukan;
- b. Meningkatnya angka kesakitan Penyakit Tidak Menular antara lain jantung, diabetes, kanker, dan stroke hal ini disebabkan karena :
1. Belum sadarnya masyarakat terhadap pola hidup sehat seperti makan buah dan sayur, aktifitas fisik, tidak merokok dan cek kesehatan rutin.
 2. Belum semua desa terdapat posbindu sebagai salah satu sarana skrining Penyakit Tidak Menular.
 3. Belum semua Fasilitas kesehatan mampu melakukan skrining Penyakit Tidak Menular antara lain kanker servik (IVA) dan pengobatan krioterapi
- c. Masih tingginya penularan penyakit, yaitu HIV/AIDs, TB, kusta, filariasis, pneumonia pada balita, DBD/cikungunya, diare, dan penyakit PD3I (Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi) hal ini disebabkan antara lain :

1. Belum semua anak mendapatkan imunisasi dasar lengkap.
 2. Belum semua orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna narkoba, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.
 3. Belum semua orang terduga TBC dilakukan pemeriksaan dahak.
 4. Masih rendahnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain masih banyaknya perilaku buang air besar sembarangan atau masih ada masyarakat yang tidak mempunyai akses jamban sehat.
- d. Masih tingginya kasus gizi buruk, gizi kurang dan stunting. Hal ini disebabkan antara lain :
1. Belum semua Ibu hamil mendapatkan pemeriksaan kehamilan sesuai standart.
 2. rendahnya pengetahuan masyarakat khususnya ibu dalam pemberian makanan pendamping ASI,
 3. masih kurangnya cakupan pemberian ASI eksklusif,
 4. belum semua anak BALITA mendapatkan pelayanan sesuai standart antara lain : penimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali setahun , pemberian kapsul vitamin A 2 kali setahun.

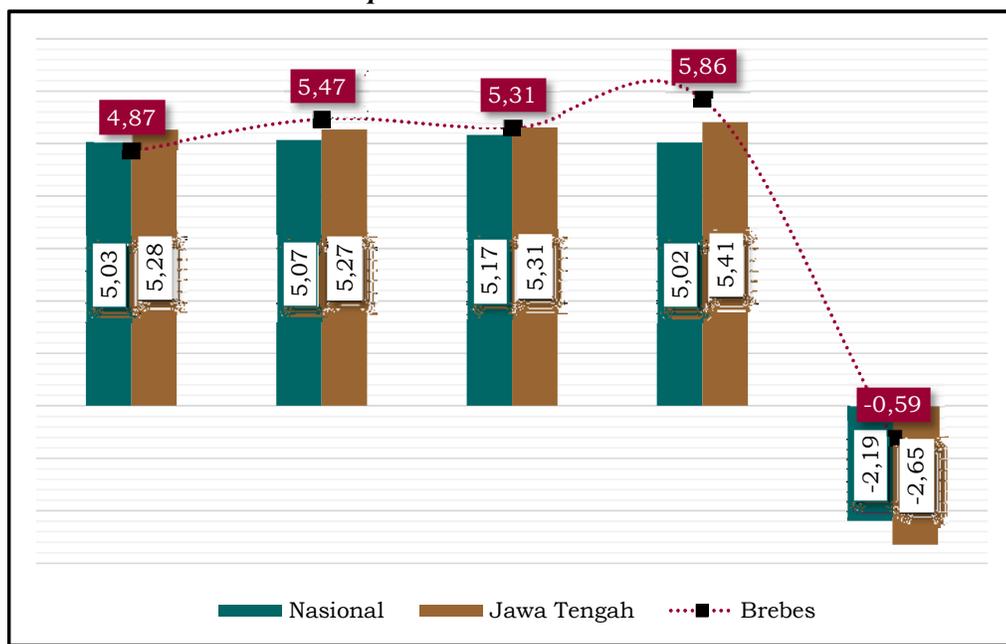
5. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah. Perhitungan pada tingkat regional Kabupaten Brebes menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambahan) pada suatu waktu tertentu. Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Brebes masih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes menunjukkan tren positif. Rata-rata angka pertumbuhannya mencapai 5,30 angka tersebut merupakan angka

rata-rata yang sama dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,00. Namun demikian dalam kurun waktu 2016-2020, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes terdapat 2 tahun pelaksanaan pembangunan yang tidak mencapai target pertumbuhan ekonomi yaitu pada tahun 2016 dan 2020. Upaya untuk meminimalisir penyebaran dan penularan COVID-19 dengan menerapkan kebijakan aktifitas dan sosial menyebabkan laju pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat. Berikut gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes.

Pandemi COVID-19 mempunyai dampak yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia, sejak pertama kali pandemi COVID-19 ditemukan, Bank Dunia mencatatkan setidaknya hanya terdapat 3 negara yang aman dari kontraksi ekonomi. Namun demikian, pandemi yang tidak mereda menjadi momok yang menyebabkan semua perekonomian negara tumbang, tidak terkecuali di Indonesia dan tingkatan pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.

Grafik 1.2
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020



Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2021

Tabel 1.5
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Brebes Tahun 2016 – 2020 (Jutaan Rupiah).

NO	LAPANGAN USAHA	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019*	Tahun 2020**
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	13.576.133,07	13.567.259,03	14.206.275,33	16.467.509,94	17.620.682,02
2.	Pertambangan dan Penggalian	875.705,39	965.250,12	1.066.482,31	1.121.278,18	1.140.038,46
3.	Industri Pengolahan	5.654.379,29	6.266.713,99	6.793.532,74	7.728.527,22	7.928.862,00
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	20.699,49	23.591,99	25.618,40	26.894,16	27.245,99
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah & daur ulang	20.715,84	21.519,93	22.663,86	24.066,85	26.514,46
6.	Konstruksi	1.515.614,18	1.669.929,16	1.849.764,06	2.004.719,54	1.954.898,63
7.	PB dan PE, reparasi mobil dan sepeda motor	5.989.882,67	6.558.788,38	7.092.755,80	7.699.773,92	7.560.499,46
8.	Transportasi dan pergudangan	1.016.072,79	1.107.774,38	1.194.879,88	1.327.640,35	927.619,74
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	1.522.687,43	1.726.196,73	1.892.782,58	2.091.586,43	2.017.871,25
10.	Informasi dan komunikasi	1.049.711,43	1.274.201,93	1.458.052,03	1.653.111,69	1.858.692,19
11.	Jasa Keuangan dan asuransi	665.471,11	733.979,46	786.731,52	829.221,96	837.554,24
12.	Real Estate	425.893,47	438.921,97	475.798,53	509.735,46	513.098,65
13.	Jasa Perusahaan	96.344,32	109.461,53	123.233,81	140.845,19	137.487,03
14.	Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	783.998,07	843.936,65	888.958,00	924.795,53	924.203,86
15.	Jasa pendidikan	1.632.639,47	1.821.477,68	2.026.135,18	2.243.621,19	2.282.091,03
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	287.074,15	310.930,04	343.287,67	374.690,49	408.057,85
17.	Jasa lainnya	757.595,85	836.161,31	925.437,30	1.020.159,62	977.783,67
TOTAL		37.448.715,50	39.963.111,45	42.973.395,83	46.188.177,72	47.143.200,53

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2021

* Angka Sementara sementara

** Angka Sangat Sementara sementara

Pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes mengalami kontraksi sebesar -0,59 persen akibat adanya pandemi Covid-19. Kelompok usaha transportasi dan pergudangan

merupakan sektor yang mengalami kontraksi paling tinggi yaitu sebesar -30,75 persen. Sebaliknya sektor informasi dan komunikasi justru mengalami kenaikan paling tinggi sebesar 11,31 persen.

Dilihat dari struktur ekonominya, Kabupaten Brebes masih didominasi oleh kelompok usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, dimana menyumbang 37,38 persen terhadap perekonomian Brebes. Kelompok usaha selanjutnya yang menyumbang besar adalah industri pengolahan yang menyumbang 16,82 persen.

Tabel 1.6
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Brebes Tahun 2016 – 2020

NO.	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019*	2020**
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	40,41	38,17	37,25	35,65	37,38
2.	Pertambangan dan Penggalian	2,34	2,42	2,48	2,43	2,42
3.	Industri Pengolahan	15,10	15,68	15,81	16,73	16,82
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
5.	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah & daur ulang	0,06	0,05	0,05	0,05	0,06
6.	Konstruksi	4,05	4,18	4,30	4,34	4,15
7.	PB dan PE, reparasi mobil dan sepeda motor	15,99	16,41	16,50	16,67	16,04
8.	Transportasi dan pergudangan	2,71	2,77	2,78	2,87	1,97
9.	Penyediaan akomodasi dan makan minum	4,07	4,32	4,40	4,53	4,28
10.	Informasi dan komunikasi	2,80	3,19	3,39	3,58	3,94
11.	Jasa Keuangan dan asuransi	1,78	1,84	1,83	1,80	1,78
12.	Real Estate	1,14	1,10	1,11	1,10	1,09
13.	Jasa Perusahaan	0,26	0,27	0,29	0,30	0,29
14.	Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib	2,09	2,11	2,07	2,00	1,96
15.	Jasa pendidikan	4,36	4,56	4,71	4,86	4,84
16.	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,77	0,78	0,80	0,81	0,87
17.	Jasa lainnya	2,02	2,09	2,15	2,21	2,07
	PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2021

* Angka Sementara sementara

** Angka Sangat Sementara sementara

6. SDM Pemerintah Kabupaten Brebes

Salah satu instrument penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes berdasarkan Kabupaten Brebes Dalam Angka Tahun 2021 bahwa pada tahun 2020 sebanyak 9.035 orang yang terdiri dari PNS laki-laki 4.714 orang dan PNS perempuan sebanyak 4.321 orang.

Tabel 1.7
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pendidikan yang ditamatkan dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Brebes Tahun 2020

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	SD / Sederajat	5	0	5
2.	SLTP / Sederajat	25	0	25
3.	SLTA / Sederajat	1.344	661	2.005
6.	Diploma	200	576	776
7.	Sarjana, Magister & Spesialis	3.140	3.084	6.224
	JUMLAH	4.714	4.321	9.035

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, 2021

Pemerintah Kabupaten Brebes membutuhkan Sumber Daya Manusia yang handal, berintegritas dan mempunyai kinerja yang baik sehingga maksimal dalam pelayanan terhadap masyarakat. Disamping SDM juga diperlukan penerapan teknologi pendukung kinerja pemerintahan. Beberapa pekerjaan sekarang sudah berbasis aplikasi atau web, diantaranya :

- SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian)
- SIMDA (Sistem Keuangan Daerah)
- SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah)
- SITAMPAN (Sistem Administrasi Pengadaan dan Pengadaan Langsung)
- SIM IKM (Sistem Informasi Indek Kepuasan Masyarakat)

- SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)
- SIMKEUDES (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa)
- SIRUP (Sistem Informasi Rancangan Umum Pengadaan)

C. Susunan Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

Adapun Perangkat Daerah berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Daerah, sejumlah 21 Dinas, yaitu :
 - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora)
 - Dinas Kesehatan (Dinkes)
 - Dinas Pekerjaan Umum (DPU)
 - Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang (DPSDAPR)
 - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinperwaskim)
 - Dinas Sosial (Dinsos)
 - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
 - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades)
 - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KB)
 - Dinas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah (DLHPS)
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil)
 - Dinas Perhubungan (Dinhub)
 - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Dinkominfotik)
 - Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan (Dinkopumdag)
 - Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker)

- Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dinbudpar)
- Dinas Arsip dan Perpustakaan (Dinarpus)
- Dinas Perikanan (Dinkan)
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP)
- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH)

5. Badan

- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD)
- Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperlitbangda)
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah (Bakesbangpolda)

6. Lembaga Teknis Daerah lainnya, yaitu :

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- RSUD Brebes
- RSUD Bumiayu

7. Kecamatan sejumlah 17 Kecamatan, yaitu :

- Kecamatan Brebes
- Kecamatan Wanasari
- Kecamatan Bulakamba
- Kecamatan Jatibarang
- Kecamatan Songgom
- Kecamatan Tanjung
- Kecamatan Losari
- Kecamatan Larangan
- Kecamatan Ketanggungan
- Kecamatan Kersana
- Kecamatan Banjarharjo
- Kecamatan Tonjong
- Kecamatan Bumiayu

- Kecamatan Sirampog
- Kecamatan Paguyangan
- Kecamatan Bantarkawung
- Kecamatan Salem

Kelurahan sejumlah 5 kelurahan, yaitu :

- Kelurahan Brebes
- Kelurahan Pasarbatang
- Kelurahan Limbangan Wetan
- Kelurahan Limbangan Kulon
- Kelurahan Gandasuli

8. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

D. Permasalahan Utama Kabupaten Brebes Tahun 2020

Ada beberapa permasalahan utama yang sedang berkembang di Kabupaten. Brebes pada tahun 2020, diantaranya upaya peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan pelayanan dasar kesehatan serta kemiskinan. Untuk itu strategi pembangunan daerah disusun berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dan mengacu pada permasalahan yang menonjol sebagai isu strategis, baik Nasional, Provinsi maupun Kabupaten.

Adapun permasalahan utama Kabupaten Brebes, secara singkat di rinci sebagai berikut :

- 1) Angka kemiskinan masih tinggi
- 2) Nilai IPM masih rendah di Provinsi Jawa Tengah
- 3) Cakupan layanan kesehatan bagi masyarakat
- 4) Kondisi sarana dan prasarana infrastruktur wilayah
- 5) Kualitas dan kelestarian sumber daya alam
- 6) Pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi yang kurang berkembang
- 7) Tingkat pengangguran yang cukup tinggi
- 8) Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes adalah perencanaan pembangunan jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

RPJMD disusun berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam mewujudkan visi, misi pembangunan agar pembangunan lebih terarah dan terukur dalam pencapaian sasaran strategis selama lima tahun.

Tahun 2020 merupakan tahun ketiga pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017–2022. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Tahunan mengacu pada RPJMD Tahun 2017–2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 dengan Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi

Pembangunan daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022 adalah untuk mencapai visi:

“Menuju Brebes Unggul, Sejahtera dan Berkeadilan”

Visi tersebut merupakan sebuah cita-cita yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dalam lima tahun. Penjelasan dari visi Kabupaten Brebes tersebut, sebagai berikut:

1. Brebes Unggul

Frasa unggul diartikan sebagai “lebih tinggi (pandai, baik, cakap, kuat, awet, dan sebagainya) daripada yang lain-lain” (KKBI). Kabupaten Brebes Unggul dimaknai sebagai cita-cita

pemerintah daerah untuk membangun Kabupaten Brebes menjadi lebih baik dan lebih unggul dibandingkan daerah lain di Jawa Tengah. Menciptakan keunggulan daerah diawali dengan membangun keunggulan kualitas sumber daya manusia Brebes, yang difokuskan pada pendidikan, keterampilan, keahlian, serta didukung dengan kualitas kesehatan yang semakin baik.

2. Brebes Sejahtera

Sejahtera dalam konteks pembangunan daerah Kabupaten Brebes adalah bagaimana pemerintah daerah mampu menyediakan ruang ekonomi seluas-luasnya bagi masyarakat Brebes. Dengan membangun perekonomian daerah inklusif dan berkelanjutan, yang kuat berbasis ekonomi kerakyatan, dan memperluas akses bekerja, maka diharapkan akan mampu menggerakkan pendapatan per kapita, meningkatkan daya beli masyarakat, mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Brebes sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan menyediakan infrastruktur dasar yang layak bagi masyarakat dan dunia usaha.

3. Brebes Berkeadilan

Berkeadilan dimaknai sebagai satu kewajiban pemerintah daerah untuk memperluas distribusi akses dan hasil pembangunan untuk seluruh wilayah dan lapisan masyarakat. Tidak hanya distribusi secara kewilayahan, tetapi juga hasil pembangunan mampu dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat, lintas gender, lintas usia dan lintas generasi.

b. Misi

Misi merupakan penjabaran mengenai cara atau upaya yang perlu dilakukan untuk tercapainya visi. Misi pembangunan Kabupaten Brebes yaitu:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan;
2. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
3. Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal;
4. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah;
5. Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri;
6. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak anak, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.

c. Tujuan

Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan, yang dijabarkan secara lebih operasional dari setiap misi. Tujuan kemudian dijabarkan dalam sasaran, yaitu sebuah rumusan kondisi yang dapat menggambarkan tercapainya sebuah tujuan. Penjabaran tujuan dan sasaran serta indikator dan targetnya pada setiap misi dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan distribusi penyelenggaraan pendidikan dan kesehatan untuk semua lapisan masyarakat;

2. Meningkatkan cakupan pemerataan pelayanan infrastruktur wilayah bagi masyarakat dan dunia usaha;
3. Meningkatkan kualitas dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis sektor unggulan dan ekonomi kerakyatan yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan, pengangguran, serta peningkatan kesejahteraan dan daya tampung lingkungan hidup;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
6. Menciptakan keamanan dan ketertiban, serta kenyamanan lingkungan masyarakat yang partisipatif;
7. Memantapkan desa dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemberdayaan desa yang baik;
8. Membangun kesetaraan gender dan mendorong perempuan untuk aktif berpartisipasi dalam pembangunan;
9. Memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata, dengan indikator Indeks Perlindungan Anak dan Indeks Identitas Anak;
10. Meningkatkan penanganan PMKS secara optimal.

d. Sasaran Strategi

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan untuk pencapaian tujuan, ditindaklanjuti dengan sasaran strategi sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan;
- 2) Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
- 3) Meningkatnya cakupan jalan dalam kondisi baik;
- 4) Meningkatnya cakupan air minum layak untuk masyarakat;
- 5) Meningkatnya cakupan sanitasi;
- 6) Meningkatnya cakupan irigasi dalam kondisi baik;

- 7) Meningkatnya penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat;
- 8) Menurunnya kawasan permukiman kumuh;
- 9) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
- 10) Meningkatnya kontribusi sektor pertanian;
- 11) Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan;
- 12) Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan;
- 13) Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata;
- 14) Meningkatnya laju investasi daerah dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- 15) Meningkatnya penguatan sistem inovasi daerah;
- 16) Meningkatnya angkatan kerja yang bekerja;
- 17) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- 18) Membaiknya kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah;
- 19) Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional dan berkompeten;
- 20) Meningkatnya kualitas kelitbangan;
- 21) Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan keindahan, serta kenyamanan lingkungan masyarakat;
- 22) Desa mampu menyusun RPJMDes tepat waktu;
- 23) Desa mampu menyusun APBDDes tepat waktu;
- 24) Desa memiliki BUMDes;
- 25) Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan
- 26) Meningkatnya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata;
- 27) Meningkatnya penanganan PMKS

e. Prioritas Pembangunan Kabupaten Brebes Tahun 2020

Mendasarkan pada isu strategis, serta kebijakan upaya pencapaian target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022, serta

RKPD Kabupaten Brebes tahun 2020 ditujukan untuk:
“Penguatan Kualitas dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Menuju SDM yang Berdaya Saing dan Mendorong Pengembangan *Digital Economy*”

Disusun prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes. Seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Prioritas Pembangunan Daerah

No	Misi RPJMD Periode Tahun 2017-2022	Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Tahun 2020
1.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan.	1. Perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan, serta pengembangan pendidikan karakter dan pendidikan vokasi; 2. Peningkatan pemerataan akses dan pelayanan kesehatan terutama prasarana dan sarana kesehatan;
2.	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.	3. Pemantapan infrastruktur wilayah dan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
3.	Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal	4. Perkuatan ekonomi daerah berbasis ekonomi kerakyatan dengan mengembangkan <i>digital economy</i> , serta memperkuat kualitas dan kapasitas tenaga kerja;
4.	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah	5. Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih hingga ditingkat pemerintahan desa, serta penciptaan kondusivitas daerah;

No	Misi RPJMD Periode Tahun 2017-2022	Prioritas Pembangunan Daerah pada RKPD Tahun 2020
5.	Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri.	6. Peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih hingga ditingkat pemerintahan desa, serta penciptaan kondusivitas daerah;
6.	Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak anak, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.	7. Peningkatan perlindungan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan dan pemenuhan hak anak.

f. Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020

Mendasarkan pada isu strategis, sasaran pembangunan tahun 2020 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	1. Harapan Lama Sekolah 2. Rata-rata Lama Sekolah
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Usia Harapan Hidup
3	Meningkatnya cakupan jalan dalam kondisi baik	Rasio Jalan Baik
4	Meningkatnya cakupan air minum layak untuk masyarakat	Cakupan akses air minum layak
5	Meningkatnya cakupan sanitasi	1. Cakupan akses jamban 2. Persentase kawasan bebas banjir perkotaan 3. Persentase penanganan persampahan
6	Meningkatnya cakupan irigasi dalam kondisi baik	Rasio jaringan irigasi baik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
7	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat	Rasio rumah layak huni
8	Menurunnya kawasan permukiman kumuh	Persentase permukiman kumuh
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup : - Indeks Kualitas Air - Indeks Kualitas Udara - Indeks Tutupan Lahan
10	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian	Kontribusi sektor pertanian
11	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	Kontribusi sektor industri pengolahan
12	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	Kontribusi sektor perdagangan
13	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata
14	Meningkatnya laju investasi daerah dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya alam, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup	1. Laju kenaikan investasi 2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)
15	Meningkatnya penguatan sistem inovasi daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan
16	Meningkatnya angkatan kerja yang bekerja	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 2. Rasio penduduk yang bekerja
17	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SKM
18	Membbaiknya kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah	1. Indeks nilai hasil evaluasi LPPD 2. Opini BPK
19	Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional dan berkompeten	Indeks Profesionalitas ASN
20	Meningkatnya kualitas kelitbangan	Persentase rekomendasi kebijakan hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah
21	Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan keindahan serta kenyamanan lingkungan masyarakat	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan)
22	Desa mampu menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu	Persentase desa yang menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
(1)	(2)	(3)
23	Desa mampu menyusun APBDes tepat waktu	Persentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu
24	Desa yang memiliki BUMDes	Rasio desa yang memiliki BUMDes
25	Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Harapan Lama sekola 2. Rata-rata Lama Sekolah 3. Usia Harapan Hidup 4. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP) 5. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan 6. Proporsi perempuan di lembaga pemerintahan ASN 7. Persentase penanganan korban KDRT
26	Meningkatnya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prevalensi anak bekerja 2. Rasio perkawinan anak 3. Cakupan anak memiliki akte 4. Persentase penanganan korban kekerasan pada anak
27	Meningkatnya penanganan PMKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial 2. Persentase PMKS penerima KUBE

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2020 yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di Tahun 2020 menjadi tumpuan bagi Pemerintah Kabupaten Brebes untuk mewujudkan kinerja output ataupun outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2020 berdasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/31/M.PAN/12/2004 tentang Penetapan Kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan

tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat/dampak kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja Tahun 2020, disusun prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan setiap tahunnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Brebes.

Diperjanjikan juga mencakup *outcome yang dihasilkan* dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam penyusunan Penetapan Kinerja bertujuan :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan untuk dicapai pada tahun 2020 tersebut di atas selanjutnya dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Bupati yang ditetapkan setelah disahkannya APBD Kabupaten Tahun 2020. Di dalam dokumen Penetapan Kinerja, tercantum sasaran strategis, indikator kinerja setiap sasaran strategis, dan target setiap indikator kinerja dimaksud baik bersifat kualitatif dan kuantitatif sehingga dapat diukur tingkat capaian kerjanya pada akhir tahun.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja secara lengkap disajikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

A. Pengukuran Kinerja

Setiap Instansi pemerintah wajib menyusun Laporan kinerja dan melaporkan progres kinerja atas mandat serta sumber daya yang digunakan sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Permenpan RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Indikator kinerja dan pengukuran kinerja sasaran merupakan instrumen manajemen untuk mengetahui tingkat capaian pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah selama 1 (satu) tahun dan mengukur tingkat akuntabilitas kinerjanya. Akuntabilitas kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban dari instansi pemerintah atas kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun melalui media pelaporan.

Pengukuran kinerja sasaran merupakan jembatan antara target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2020 dengan capaian kinerjanya pada akhir tahun 2020 serta mengetahui tingkat akuntabilitas pelaksanaannya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya pada setiap pelaksanaan urusan pemerintahan.

Kerangka pengukuran kinerja di Pemerintah Kabupaten Brebes dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

→ Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

→ Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu :

Tabel 3.1
Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90,1 s.d lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75,1 s.d 90	Tinggi / Berhasil
65,1 s.d 75	Sedang / Cukup Berhasil
50,1 s.d 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d 50	Sangat Rendah / Sangat Tdk Berhasil

2. Capaian Kinerja Sasaran

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja. Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan berdasarkan “Metode Rata-rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indicator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil dan sangat tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan rumus penghitungan :

$$\text{Capaian Kinerja Sasaran} = \frac{\text{Jml Indikator untuk setiap kategori} \times \text{nilai mean setiap kategori}}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}} \times 100$$

Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :

Sangat Berhasil	: 95
Berhasil	: 82,5
Cukup Berhasil	: 70
Tidak Berhasil	: 57,5
Sangat Tidak Berhasil	: 25

B. Capaian Kinerja 2020

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian target kinerja, di bawah ini akan disajikan capaian kinerja sasaran strategis Tahun 2020. Secara umum realisasi kinerja Pemerintah Kabupaten Brebes dapat dicapai dengan baik dan disajikan pula informasi kinerja lainnya yang telah dicapai sampai dengan akhir Tahun 2020.

Pemerintah Kabupaten Brebes telah menetapkan 6 (enam) Misi dan 27 (dua puluh tujuh) sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 45

(empat puluh lima) indikator sasaran. Realisasi kinerja pada akhir tahun menunjukkan bahwa secara keseluruhan target sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik, dengan rata-rata persentase pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan adalah 184.34. Suatu organisasi dinyatakan berhasil apabila hasil capaian target kinerjanya melebihi 75 dari target kinerja perencanaan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Brebes ditetapkan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 041 Tahun 2018 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022, Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Brebes Tahun 2017-2022.

Hingga akhir tahun 2020 capaian indikator kinerja utama Kabupaten Brebes, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun 2020
Capaian Kinerja Sasaran

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROSENTASE CAPAIAN
1	2	3
1	Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	94,62
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	101,29
3	Meningkatnya cakupan jalan dalam kondisi baik	104,41
4	Meningkatnya cakupan air minum layak untuk masyarakat	106,58
5	Meningkatnya cakupan sanitasi	107,20
6	Meningkatnya cakupan irigasi dalam kondisi baik	115,76
7	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat	115,50
8	Menurunnya kawasan permukiman kumuh	80,09
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	92,55
10	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian	88,85
11	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	130,68

NO.	SASARAN STRATEGIS	PROSENTASE CAPAIAN
1	2	3
12	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	121,93
13	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	43,38
14	Meningkatnya laju investasi daerah dengan memperhatikan ketersediaan sumberdaya alam, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup	271,66
15	Meningkatnya penguatan sistem inovasi daerah	66,67
16	Meningkatnya angkatan kerja yang bekerja	95,18
17	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	102,41
18	Membaiknya kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah	<i>Dalam Proses</i>
19	Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional dan berkompeten	168,28
20	Meningkatnya kualitas kelitbangan	166,67
21	Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan keindahan serta kenyamanan lingkungan masyarakat	100
22	Desa mampu menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu	100
23	Desa mampu menyusun APBDDes tepat waktu	100
24	Desa yang memiliki BUMDes	100
25	Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan	116,21
26	Meningkatnya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata	146,75
27	Meningkatnya penanganan PMKS	133,33
Rata – rata Capaian Kinerja Tahun 2020		114,23

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 45 indikator kinerja utama, disimpulkan bahwa :

- 35 indikator dengan kategori "Sangat berhasil"
- 5 indikator dengan kategori "Berhasil"
- 2 indikator dengan kategori "Cukup Berhasil"
- - (tidak ada) indikator dengan kategori "Tidak Berhasil"
- 1 indikator dengan kategori "Sangat Tidak Berhasil"
- 2 indikator masih dalam proses hasil penilaian (evaluasi LPPD dan Opini BPK)

Adapun realisasi dan capaian kinerja indikator sasaran tahun 2020 apabila dibandingkan dengan realisasi dan capaian kinerja tahun sebelumnya adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Capaian Kinerja 2019	2020			Status Capaian 2020 terhadap 2019	Ket.
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	101,18	12.07	12.04	99.75	▽	△ = naik ▽ = turun ○ = tetap
2	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	91,99	6.94	6.21	89.48	▽	
3	Usia Harapan Hidup (tahun)	100,88	68.45	69.33	101.29	△	
4	Rasio jalan baik (%)	96,97	80	83.53	104.41	△	
5	Cakupan akses air minum layak (%)	106,99	89.55	95.44	106.58	▽	
6	Cakupan akses jamban (%)	120,79	72.8	110.57	151.88	△	
7	Persentase kawasan bebas banjir perkotaan (%)	106,38	96	95	98.96	▽	
8	Persentase Penanganan Persampahan (%)	68,15	24.66	17.45	70.76	△	
9	Rasio jaringan irigasi baik (%)	102,40	63.06	73	115.76	△	
10	Rasio rumah layak huni (%)	65,87	86.58	100	115.50	△	
11	Persentase permukiman kumuh (%)	134,51	37.27	29.85	80.09	▽	
12	Indek Kualitas Air	80,70	36.3	30	82.64	△	
13	Indeks Kualitas Udara	103,77	83.1	82.62	99.42	▽	
14	Indek Kualitas Tutupan Lahan	99,99	68	65	95.59	▽	
15	Kontribusi sektor pertanian (juta rupiah)	88,85	19.830,942	17.620,682	88.85	○	

No	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Capaian Kinerja 2019	2020			Status Capaian 2020 terhadap 2019	Ket.
			Target	Realisasi	Capaian		
16	Kontribusi sektor industri pengolahan (juta rupiah)	130,14	6.067,410	7.928,862	130.68	△	
17	Kontribusi sektor perdagangan (juta rupiah)	125,24	6.208,182	7.569,499	121.93	▽	
18	Kontribusi sektor pariwisata (juta rupiah)	99,54	2.254,189	977,783	43.38	▽	
19	Laju kenaikan investasi (%)	114,67	2	2.28	114.00	▽	
20	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA / PMDN) (milyar rupiah)	172,93	1,357	5,826	429.33	△	
21	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan (%)	100,00	60	40	66.67	▽	
22	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	96,97	69.25	66.65	96.25	▽	
23	Rasio penduduk yang bekerja (%)	97,77	64.85	61.03	94.11	▽	
24	Nilai SKM	101,77	77.52	79.39	102.41	△	
25	Indeks nilai hasil evaluasi LPPD	Sangat Tinggi	Tinggi	Masih Proses	Sangat Tinggi	○	
26	Opini BPK	WTP	WTP	Masih Proses	WTP	○	
27	Indeks Profesionalitas ASN	117,32	63.11	106.2	168.28	△	
28	Persentase rekomendasi kebijakan hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah (%)	250,00	60	100	166.67	▽	
29	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan) (%)	100,00	100	100	100.00	○	
30	Persentase desa yang menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu (%)	275,55	51.36	51.36	100.00	▽	
31	Persentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu (%)	275,55	51.36	51.36	100.00	▽	
32	Rasio desa yang memiliki BUMDes (%)	275,55	51.36	51.36	100.00	▽	

No	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran)	Capaian Kinerja 2019	2020			Status Capaian 2020 terhadap 2019	Ket.
			Target	Realisasi	Capaian		
33	Harapan Lama sekolah (tahun)	101,18	12.07	12.04	99.75	▽	
34	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	91,99	6.94	6.21	89.48	▽	
35	Usia Harapan Hidup (tahun)	100,88	68.45	69.33	101.29	△	
36	Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (PPP) (ribu rupiah)	159,57	6436	10058	156.28	▽	
37	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan (%)	109,34	2.12	2.12	100.00	▽	
38	Proporsi perempuan di lembaga pemerintahan ASN (%)	170,03	28.11	46.86	166.70	▽	
39	Persentase penanganan korban KDRT (%)	100,00	100	100	100.00	○	
40	Prevalensi anak bekerja (%)	184,00	0.0182	0	200.00	△	
41	Rasio perkawinan anak (%)	307,14	0.42	0.014	196.67	△	
42	Cakupan anak memiliki akte (%)	93,42	93	84	90.32	▽	
43	Persentase penanganan korban kekerasan pada anak (%)	100,00	100	100	100.00	○	
44	Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial (%)	200,00	60	100	166.67	▽	
45	Persentase PMKS penerima KUBE (%)	200,00	6	6	100.00	▽	

CAPAIAN KINERJA SASARAN

Dengan telah dilaksanakan pengukuran kinerja beserta simpulan rata – rata sesuai dengan Metode rata–rata data kelompok, maka dari 27 Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja tersebut, memiliki capaian kinerja masing – masing sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.4
Rata – rata Capaian Sasaran Strategis Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Jml Indikator	Rata – rata	Kategori	Rincian Kategori untuk Indikator					
					Belum diketahui	Sangat rendah 0 < 50	Rendah 50,1 sd 65	Sedang 65,1 sd. 75	Tinggi 75,1 sd. 90	Sangat Tinggi 90,1 sd. lebih
1.	Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan	2	94,62	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	2
2	Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	1	101,29	Sangat tinggi	-	-	-	-	-	1
3	Meningkatnya cakupan jalan dalam kondisi baik	1	104,41	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	1
4	Meningkatnya cakupan air minum layak untuk masyarakat	1	106,58	Sangat tinggi	-	-	-	-	-	1
5	Meningkatnya cakupan sanitasi	3	107,20	Sangat tinggi	-	-	-	1	-	2
6	Meningkatnya cakupan irigasi dalam kondisi baik	1	115,76	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	1
7	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat	1	115,50	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	1
8	Menurunnya kawasan permukiman kumuh	1	80,09	Tinggi	-	-	-	-	1	-
9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	3	92,55	Sangat Tinggi	-	-	-	-	1	2
10	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian	1	88,85	Tinggi	-	-	-	-	1	-
11	Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan	1	130,68	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	1
12	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan	1	121,93	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	1
13	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata	1	43,38	Sangat Rendah	-	1	-	-	-	-
14	Meningkatnya laju investasi daerah dg memperhatikan ketersediaan sumberdaya alam, daya dukung, dan daya tampung lingkungan hidup	2	271,66	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	2
15	Meningkatnya penguatan sistem inovasi daerah	1	66,67	Sedang	-	-	-	1	-	-

No.	Sasaran Strategis	Jml Indikator	Rata – rata	Kategori	Rincian Kategori untuk Indikator					
					Belum diketahui	Sangat rendah 0 < 50	Rendah 50,1 sd 65	Sedang 65,1 sd. 75	Tinggi 75,1 sd. 90	Sangat Tinggi 90,1 sd. lebih
16	Meningkatnya angkatan kerja yang bekerja	2	95,18	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	2
17	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	102,41	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	1
18	Membaiiknya kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah	2	Dalam Proses	Belum Diketahui	2	-	-	-	-	-
19	Meningkatnya kualitas aparatur yang profesional dan berkompeten	1	168,28	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	1
20	Meningkatnya kualitas kelitbangan	1	166,67	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	1
21	Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan keindahan serta kenyamanan lingkungan masyarakat	1	100	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	1
22	Desa mampu menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu	1	100	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	1
23	Desa mampu menyusun APBDes tepat waktu	1	100	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	1
24	Desa yang memiliki BUMDes	1	100	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	1
25	Meningkatnya kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan	7	116,21	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	7
26	Meningkatnya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara merata	4	146,75	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	4
27	Meningkatnya penanganan PMKS	2	133,33	Sangat Tinggi	-	-	-	-	-	2
Rata-rata Capaian Sasaran strategis			114,23	Sangat Tinggi	1	1	-	1	2	22

Rata – rata capaian sasaran strategis sebesar 114,23% dengan kategori Sangat Tinggi.

Capaian dari 27 (dua puluh tujuh) Sasaran Strategis:

- ◀ 22 Sasaran dengan kategori Sangat Tinggi
- ◀ 2 Sasaran dengan kategori Tinggi
- ◀ 1 Sasaran dengan kategori Sedang
- ◀ 1 Sasaran dengan kategori Sangat Rendah
- ◀ 1 Sasaran dengan kategori Belum Diketahui Hasilnya

CAPAIAN KINERJA MENURUT MISI

Adapun capaian indikator kinerja sasaran menurut misi dapat disimpulkan dari 45 Indikator Kinerja adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Menurut Misi

No	Misi/kategori	Jumlah Indikator	Presentase
1	MISI 1	3	96,84
	Sangat Berhasil	3	
	Berhasil	-	
	Cukup Berhasil	-	
	Tidak Berhasil	-	
	Sangat Tidak Berhasil	-	
2	MISI 2	11	101,96
	Sangat Berhasil	8	
	Berhasil	2	
	Cukup Berhasil	1	
	Tidak Berhasil	-	
	Sangat Tidak Berhasil	-	
3	MISI 3	9	143,07
	Sangat Berhasil	6	
	Berhasil	1	
	Cukup Berhasil	1	
	Tidak Berhasil	-	
	Sangat Tidak Berhasil	1	

4	MISI 4	6	134,34
	Sangat Berhasil	4	
	Berhasil	2	
	Cukup Berhasil	-	
	Tidak Berhasil	-	
	Sangat Tidak Berhasil	-	
5	MISI 5	3	100.,00
	Sangat Berhasil	3	
	Berhasil	-	
	Cukup Berhasil	-	
	Tidak Berhasil	-	
	Sangat Tidak Berhasil	-	
6	Misi 6	13	132,10
	Sangat Berhasil	13	
	Berhasil	-	
	Cukup Berhasil	-	
	Tidak Berhasil	-	
	Sangat Tidak Berhasil	-	

C. ANALISA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

MISI - I: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, cerdas, sehat dan berdaya saing tinggi, berbasis pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pendidikan dan kesehatan

Sasaran Strategis 1 **Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan**

Sasaran Strategis “Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan” sebagaimana tercantum di dalam Indikator Kinerja Utama Kabupaten Brebes tahun 2017–2022, terdiri dari 2 Indikator Kinerja yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata

Lama Sekolah. Secara keseluruhan hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut, sebagai berikut :

Tabel. 3.6
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2019	Target	Realisasi	Capaian Th. 2020	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Harapan Lama Sekolah	Tahun	101,18	12.07	12.04	99.75	12.43
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	91,99	6.94	6.21	89.48	7.37
Rata-rata		96,58			94,62	

Secara umum capaian dari Sasaran Strategis Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan dapat dicapai yaitu sebesar 94,62 atau tercapai dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Dalam mengukur Indikator Kinerja Utama, didasarkan pada Indikator Kinerja Organisasi Perangkat Daerah, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagai secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3.7
Capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	APK PAUD		68	72.05	105.96
2	Angka Partisipasi Kasar SD/MI		100	98.17	98.17
3	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs		91	88.22	96.95
4	Angka Partisipasi Murni SD/MI		87	87.56	100.64
5	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs		70	63.89	91.27
6	Angka Putus Sekolah SD/MI		0.1	0.13	76.92

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
7	Angka Putus Sekolah SMP/MTs		0.25	0.52	48.08
8	Angka Melanjutkan Sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs		94.55	93.85	99.26
9	Angka Melanjutkan Sekolah dari SMP/MTs ke SMA/SMK		84	80.25	95.54
10	Angka Kelulusan SD/MI		100	100	100
11	Angka Kelulusan SMP/MTs		100	100	100
12	Angka Kelulusan Paket A		100	100	100
13	Angka Kelulusan Paket B		100	100	100
14	Angka Kelulusan Paket C		100	100	100
15	Angka Melek Huruf Penduduk lebih dari 15 Tahun		96.50	95.04	98.49
16	Rata-rata Nilai US SD : 1. Bahasa Indonesia 2. Matematika 3. IPA	Poin	61 51 51	66 63 66	108.56 123.33 128.67
	Rata-rata Nilai UN SMP : 1. Bahasa Indonesia	Poin	61	62	101.25
	2. Bahasa Inggris		51	55	107.88
	3. Matematika		51	53	104.41
	4. IPA		56	54	95.77
17	Prosentase Kelompok Pemuda Produktif yang berprestasi		17.5	17.65	100.9
18	Prosentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif		72.22	88.24	122.18
19	Prestasi Olahraga	medali	95	0	0

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Brebes

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator APK PAUD, dengan capaian kinerja 105.96, pada indikator Angka Partisipasi Murni SD/MI, dengan capaian kinerja 100.64, pada indikator Rata-Rata Nilai Ujian Sekolah SD, dengan capaian kinerja 120.19, pada indikator Rata-Rata Nilai Ujian Nasional SMP, dengan

capaian kinerja 104.51, pada indikator Prosentase Kelompok Pemuda Produktif yang berprestasi, dengan capaian kinerja 100.9, pada indicator Prosentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif, dengan capaian kinerja 122.18.

Capaian kinerja yang tidak mencapai target 100 ditunjukkan pada indikator Angka Partisipasi Kasar SD/MI, dengan capaian kinerja 98.17, indikator Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs, dengan capaian kinerja 96.95, Angka Partisipasi Murni, dengan capaian kinerja 91.27, Angka Putus Sekolah SD/MI, dengan capaian kinerja 76.92, Angka Putus Sekolah SMP/MTs, dengan capaian kinerja 48.08, Angka melanjutkan Sekolahan dari SD/MI ke SMP/MTs, dengan capaian kinerja 99.26, Angka melanjutkan Sekolah dari SMP/MTs ke SMA/SMK, dengan capaian kinerja 95.54, Angka Melek Huruf Penduduk lebih dari 15 Tahun, dengan capaian kinerja 98.49, dan Prestasi Olahraga, dengan capaian 0.

Dari 19 Indikator Kinerja Sasaran yang merupakan **Indikator Kinerja Utama** (IKU) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada tahun 2020, 5 indikator menunjukkan capaian lebih dari 100 atau **melebihi target**, dan 9 indikator menunjukkan capaian kurang dari 100 atau **tidak tercapai**, dan 5 indikator yang menunjukkan capaian 100 atau **sesuai target**.

Tingkat ketercapaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait dan dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh *stakeholder* dalam mendukung capaian sejumlah indikator tersebut. Untuk target IKU Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes yang tingkat pencapaiannya belum mencapai 100 dan belum tersedia datanya pada tahun 2020, masih diperlukan upaya kinerja yang lebih keras, fokus, dan terarah, dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhinya.

Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat

Sasaran Strategis “Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat” sebagaimana tercantum di dalam Indikator Kinerja Utama Kabupaten Brebes tahun 2017–2022, terdiri dari 1 Indikator Kinerja yaitu Usia Harapan Hidup. Hasil pengukuran kinerja sasaran tersebut :

Tabel. 3.8
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2019	Target	Realisasi	Capaian Th. 2020	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Usia Harapan Hidup	Tahun	100,88	68.45	69.33	101,29	68.47

Dari tabel diatas untuk capaian dari Sasaran Strategis Meningkatnya Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat dapat dicapai yaitu sebesar 101,29 atau tercapai dengan kategori **Sangat Berhasil** dan melampaui target yang ditetapkan.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) dan capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja

utama Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.9
Capaian Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes
Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian 2020	Capaian 2019
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil (%)	92	88,33	96	96,9
		Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin (%)	96	93,54	97,4	104,7
		Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir (%)	96	98,8	102,9	102,9
		Pelayanan Kesehatan Balita (%)	92	77,93	84,7	94,5
		Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar (%)	84	71,43	85	112,6
		Pelayanan Kesehatan pada usia Produktif (%)	78	19,83	25,4	17,8
		Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut (%)	44	32,71	74,3	146
		Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (%)	100	25,63	25,6	26,3
		Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus (%)	100	72,64	72,6	128,6
		Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (%)	100	46,18	46,2	56,78
		Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB (%)	80	24,38	30,5	55,1
		Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV (%)	75	68,92	91,9	129,97
		AKB/100.000 KLH	12	9,51	120,8	120,8
		Kasus Kematian Ibu	30	62	206,7	119,4

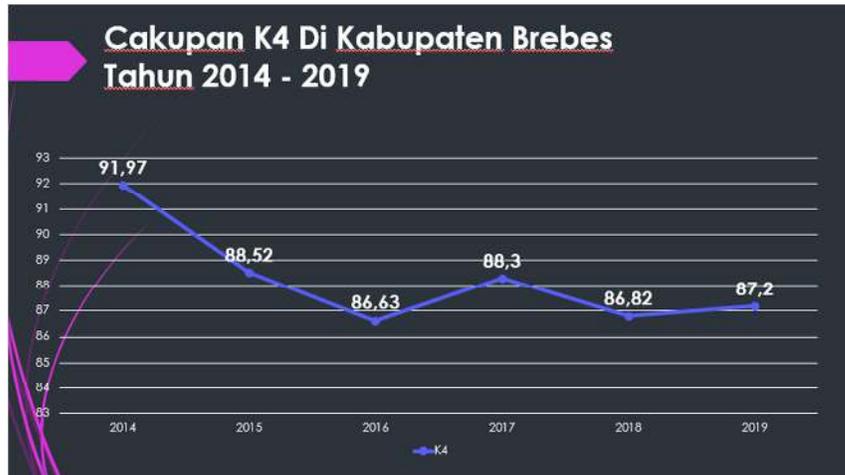
Berdasarkan Tabel di atas dapat dilihat dari 14 indikator yang ada, 2 indikator telah melampaui target (14,3) dan ada 12 indikator belum mencapai target (85,7). Adapun capaian masing-masing indikator dari sasaran 1 adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Capaian kinerja pelayanan kesehatan ibu hamil pada tahun 2020 belum mencapai target yaitu sebesar 96 , capaian ini masuk dalam kategori “Baik” akan tetapi lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu sebesar 96,9 .

Salah satu penilaian yang dapat mempengaruhi capaian pelayanan kesehatan ibu hamil adalah cakupan kunjungan ke 4 (K4). Bila melihat perkembangan cakupan K4 di Kabupaten Brebes dapat dilihat sebagai berikut:

Garafik 3.1
Cakupan K4 Di Kabupaten Brebes



Rendahnya cakupan K4 di Kabupaten Brebes disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Mobilitas ibu hamil ke luar kota yang cukup tinggi sebelum mencapai K4.
- b. Adanya persalinan premature, sehingga ibu hamil tidak dapat mencapai K4.
- c. Adanya kasus abortus pada ibu hamil.

2. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Capaian kinerja pelayanan kesehatan ibu bersalin pada tahun 2020 masih di bawah target target yaitu sebesar 97,4 , capaian ini masuk dalam kategori “Baik” akan tetapi ada sedikit penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu sebesar 104,7

Penilaian yang dapat mempengaruhi capaian pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dan pelayanan pasca persalinan. Bila melihat

perkembangan persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dan pelayanan pasca persalinan di Kabupaten Brebes dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 3.2
Cakupan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan



Gambar 3.2
Pemeriksaan Kehamilan Menjelang Persalinan



3. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Capaian kinerja pelayanan kesehatan bayi baru lahir pada tahun 2020 telah melampaui target yaitu sebesar 102,9 , capaian ini masuk dalam kategori “Sangat Baik” capaian ini sama dengan capaian tahun 2019 yaitu sebesar 102,9 .

Salah satu penilaian yang dapat mempengaruhi capaian pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah pelayanan kesehatan neonatal. Bila melihat perkembangan pelayanan kesehatan neonatal di Kabupaten Brebes dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 3.3
Cakupan Kunjungan Neonatal Lengkap



Gambar 3.3
Pelayanan Posyandu Untuk Batita



4. Pelayanan Kesehatan Balita

Capaian kinerja pelayanan kesehatan balita pada tahun 2020 belum melampaui target yaitu sebesar 84,7 , meskipun belum mencapai target capaian ini dapat dikategorikan “Baik” akan tetapi capaian tahun 2020 mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu sebesar 94,5 .

Tidak tercapainya indikator ini di sebabkan karena beberapa hal, diantaranya yaitu:

- a. Masih rendahnya kesadaran para ibu untuk membawa anak balitanya ke Posyandu terutama yang berusia 3 sampai 5 tahun.
- b. Mobilitas keluarga ke luar kota yang cukup tinggi (urban)
- c. Belum semua balita mendapat pelayanan yang standar sesuai SOP karena masih ada fasilitas kesehatan yang secara sarana prasarana nya masih belum tercukupi sesuai standar.

Gambar 3.4
Pelayanan Penimbangan Anak Balita



5. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Capaian kinerja pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar pada tahun 2020 tidak mencapai target yaitu sebesar 85 , capaian ini dikategorikan “Baik”. Capaian tahun

2020 ini lebih rendah jika dengan capaian capaian tahun 2019 yaitu 112,6 .

Capaian kinerja ini tidak mencapai target disebabkan karena adanya kebijakan terkait penanggulangan wabah *covid 19* dengan ditiadakannya pembelajaran tatap muka di semua jenjang pendidikan, hal ini menyebabkan kegiatan penjarangan di setiap sekolah sangat terbatas.

6. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Capaian kinerja pelayanan kesehatan pada usia produktif pada tahun 2020 hanya sebesar 25,4 jauh di bawah target yang ditetapkan dan masuk ke kategori “Kurang”, akan tetapi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yang hanya sebesar 17,8 maka terdapat perkembangan yang cukup signifikan.

Berdasarkan Permenkes Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, bahwa semua penduduk usia 15 – 59 tahun harus diperiksa sebagai berikut:

- a) Deteksi kemungkinan obesitas dilakukan dengan memeriksa tinggi badan dan berat badan serta lingkar perut.
- b) Deteksi hipertensi dengan memeriksa tekanan darah sebagai pencegahan primer.
- c) Deteksi kemungkinan diabetes mellitus menggunakan tes cepat gula darah.
- d) Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku.
- e) Pemeriksaan ketajaman penglihatan.
- f) Pemeriksaan ketajaman pendengaran.
- g) Deteksi dini kanker dilakukan melalui pemeriksaan payudara klinis dan pemeriksaan IVA khusus untuk wanita usia 30 – 59 tahun.

Untuk capaian SPM pelayanan kesehatan pada usia produktif di Kabupaten Brebes baru sebesar 25,4 . Artinya baru 25,4 penduduk usia 15 – 59 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sebanyak 7 parameter tersebut. Hal ini disebabkan karena:

- 1) Keterbatasan sumber daya kesehatan untuk menjangkau seluruh penduduk usia produktif.
- 2) Belum ada sistem informasi yang terpadu untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan sesuai 7 parameter tersebut.
- 3) Kurangnya kesadaran penduduk usia produktif untuk melakukan deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular.
- 4) Pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular masih belum dianggap sepenuhnya sebagai sesuatu yang penting.
- 5) Masih kurangnya kader posbindu yang terlatih.
- 6) Masih lemahnya sistem pencatatan dan pelaporan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular.

Meskipun capaian indikator pelayanan kesehatan pada usia produktif Kabupaten Brebes baru 25,4 , bukan berarti 74,6 penduduk Kabupaten Brebes usia 15 – 59 tahun lainnya tidak mendapat pelayanan kesehatan sama sekali, karena kebanyakan mereka hanya mendapat pelayanan kesehatan 3 sampai 4 parameter pemeriksaan saja.

Gambar 3.5
Pengukuran Kebugaran dan Kesehatan Karyawan Puskesmas



7. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Capaian kinerja pelayanan kesehatan pada usia lanjut pada tahun 2020 telah melampaui target yaitu sebesar 74,3 , dan capaian ini masuk kategori “Cukup”. Capaian kinerja ini juga jauh lebih rendah jika dibandingkan capaian tahun 2019 yaitu sebesar 146 .

Gambar 3.6
Kegiatan Posyandu Lansia



8. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Capaian kinerja pelayanan kesehatan penderita hipertensi pada tahun 2020 masih di bawah target yaitu sebesar 25,6 , dan capaian ini masuk kategori “Kurang”. Capaian kinerja ini juga lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu sebesar 26,3 .

Pelayanan kesehatan penderita hipertensi tidak dapat mencapai target disebabkan karena beberapa hal, yaitu:

- a) Informasi tentang pelayanan atau pemeriksaan hipertensi di dokter atau klinik swasta belum terintegrasi dengan Dinas Kesehatan.
- b) Kurangnya kesadaran penduduk yang berusia diatas 15 tahun untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah.

- c) Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya dari tekanan darah tinggi.

Gambar 3.7
Pelayanan Pengukuran Tekanan Darah Masyarakat

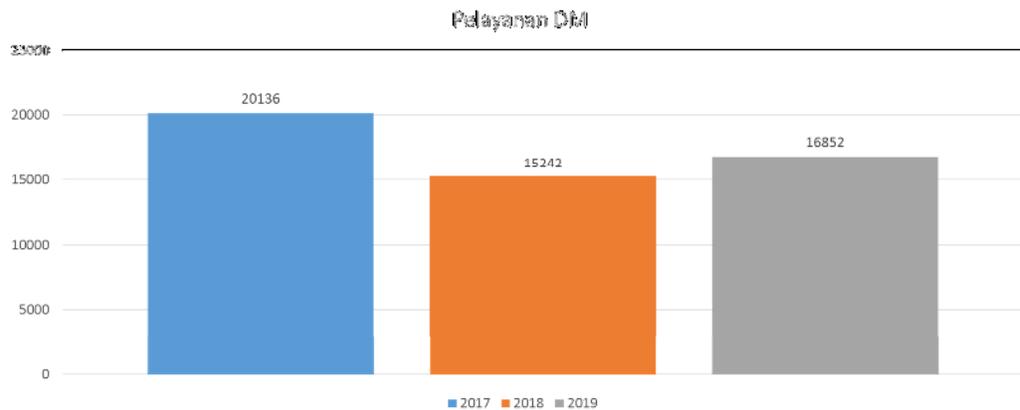


9. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Capaian kinerja pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus pada tahun 2020 tidak mencapai target yaitu sebesar 72,6 , capaian ini masuk kategori “Cukup”, dan capaian kinerja ini juga lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu sebesar 128,6 .

Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus dari tahun 2017 sampai tahun 2020 dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 3.4
Perbandingan Jumlah Penderita DM Yang Dilayani Kesehatan Dengan Total Penderita DM Secara Keseluruhan



Gambar 3.8
Pelayanan Pengukuran Gula Darah

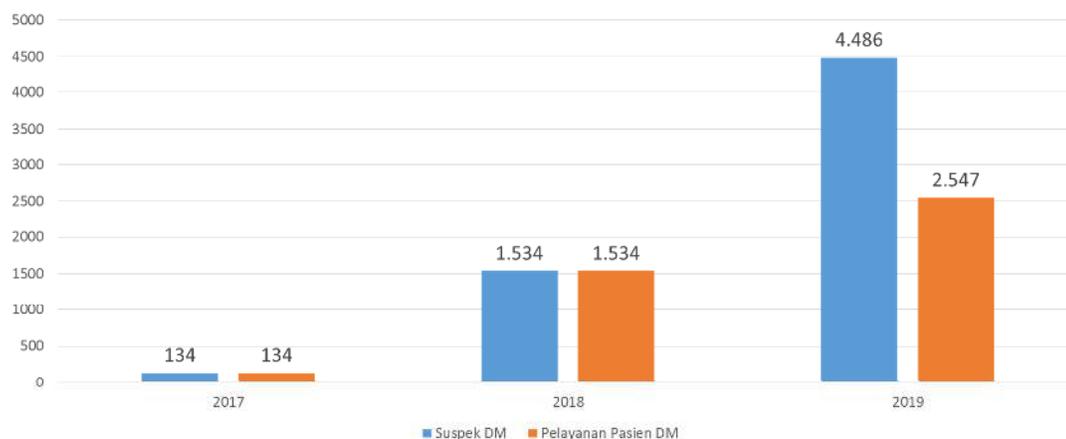


10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Capaian kinerja pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat pada tahun 2020 masih di bawah target yaitu sebesar 46,2 , dan capaian ini masuk kategori “Kurang”. Capaian pada tahun 2020 lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu sebesar 56,78.

Perbandingan antara suspek ODGJ dengan pelayanan kesehatan ODGJ dapat dilihat dalam grafik berikut:

Grafik 3.5
Perbandingan Pelayanan Kesehatan ODGJ dengan Jumlah Total ODGJ Di Kabupaten Brebes



Tidak tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat disebabkan karena beberapa hal, yaitu:

- Rendahnya skrining gangguan jiwa di masyarakat.
- Masih minimnya kelompok masyarakat peduli jiwa (kader jiwa)
- Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gangguan jiwa menjadi faktor penyebab dominan.

Gambar 3.9
Pemeriksaan dan Kunjungan Ke Rumah Orang Gangguan Jiwa Yang Dipasung



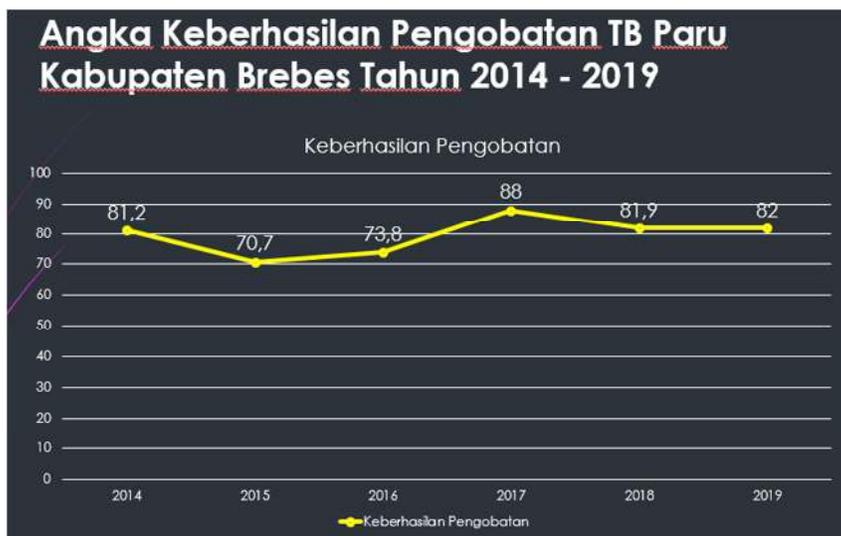
11. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TB

Capaian kinerja pelayanan kesehatan orang dengan TB pada tahun 2020 di bawah target yaitu sebesar 30,5, capaian ini dikategorikan “Kurang”, dan capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu sebesar 55,1.

Salah satu penyebab rendahnya data pelayanan kesehatan orang dengan TB belum mencapai target karena data yang tersedia baru sampai dengan bulan September 2020, dan data valid baru dapat tersedia pada bulan Maret 2021.

Salah satu penilaian yang dapat mempengaruhi capaian pelayanan kesehatan orang dengan TB adalah angka keberhasilan pengobatan TB. Bila melihat perkembangan pelayanan kesehatan orang dengan TB di Kabupaten Brebes dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 3.6
Angka Keberhasilan Pengobatan TB



Tidak tercapainya pelayanan kesehatan orang dengan TB disebabkan karena beberapa hal, yaitu:

- Pemeriksaan kasus TBC di Puskesmas mengalami kendala karena keterbatasan SDM.
- Masyarakat merasa sehat sehingga tidak mau melakukan pemeriksaan dahak meskipun orang tersebut termasuk dalam suspek TB.

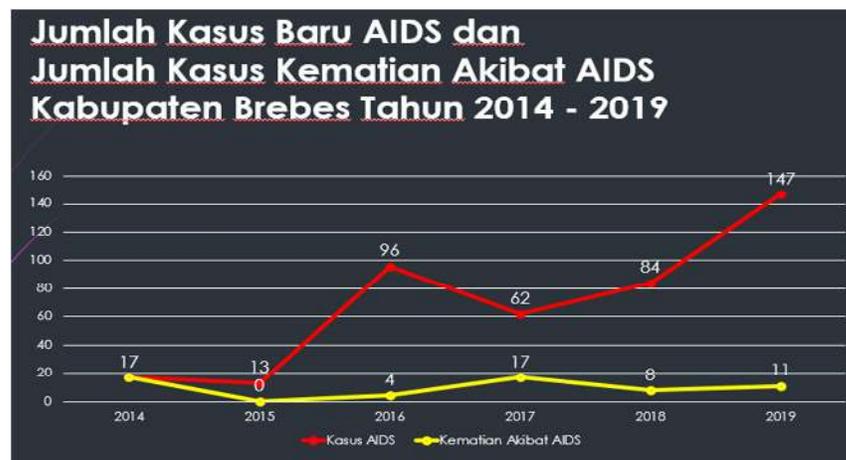
- c. Dahak sulit keluar saat dilakukan pemeriksaan.
- d. Kader sulit membujuk masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dahak jika tidak didampingi petugas.
- e. Tidak semua terduga TB dilaporkan melalui sistem informasi tuberculosis (SITT).

12. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV

Capaian kinerja pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV pada tahun 2020 telah mencapai target yaitu sebesar 91,9 , dan masuk kategori “Baik”. Capaian tahun 2020 lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yaitu sebesar 129,97 .

Salah satu penilaian yang dapat mempengaruhi capaian pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV adalah penemuan orang yang terinfeksi HIV/AIDS. Bila melihat perkembangan penemuan orang yang terinfeksi HIV/AIDS di Kabupaten Brebes dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 3.7
Jumlah Kasus HIV, AIDS dan Kematian Akibat AIDS Di Kabupaten Brebes



Gambar 3.10
Penyuluhan Tentang HIV/AIDS dan Tes VCT

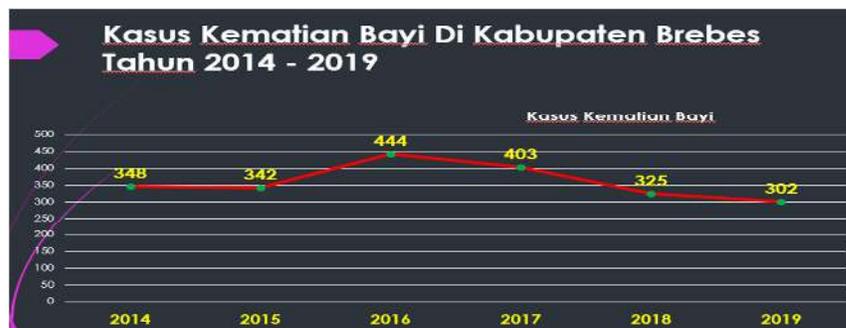


13. Angka Kematian Bayi / 100.000 KLH

Capaian kinerja tentang angka kematian bayi pada tahun 2020 telah melampaui target yaitu sebesar 120,8 dan masuk kategori “Sangat Baik”. Capaian tahun 2020 sama dengan capaian tahun 2019 yaitu sebesar 120,8

Perkembangan angka kematian bayi di Kabupaten Brebes dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 3.8
Angka Kematian Bayi



14. Kasus Kematian Ibu

Capaian kinerja tentang kasus kematian ibu pada tahun 2020 di bawah target yaitu sebesar 206,7 dan dikategorikan “Kurang”. Capaian kinerja pada tahun 2020 lebih rendah jika dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 119,4 .

Capaian kinerja tentang kasus kematian ibu merupakan indikator negatif, sehingga semakin besar nilai capaian kinerja maka menandakan hasil yang semakin buruk.

Perkembangan kasus kematian ibu di Kabupaten Brebes dapat dilihat sebagai berikut:

Grafik 3.9
Kasus Kematian Ibu



Tidak tercapainya target kinerja tentang kematian ibu disebabkan karena beberapa hal, yaitu:

- a. Kepatuhan petugas tentang SOP penanganan ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu pasca salin.
- b. Penanganan bumil resti oleh nakes belum dilakukan secara optimal.
- c. Belum optimalnya sistem umpan balik ibu nifas pulang dari rumah sakit.
- d. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dan tokoh masyarakat dalam pendampingan ibu hamil.
- e. Belum optimalnya peran rumah sakit dalam mensikapi rujukan kasus gawat darurat.

MISI II : Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah sesuai rencana tata ruang dengan memperhatikan kelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

Sasaran Strategis 2.1
Meningkatnya cakupan jalan dalam kondisi baik

Sasaran Strategis “Meningkatnya cakupan jalan dalam kondisi baik” sebagaimana tercantum di dalam Indikator Kinerja Utama Kabupaten Brebes tahun 2017 – 2022, bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.10
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Jalan

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2019	Target	Realisasi	Capaian Th. 2020	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Jalan Kabupaten dalam kondisi baik	%	121,6	80	83,53	104,41	82

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa capaian untuk **sasaran 1** : Persentase Jalan Kabupaten kondisi mantap tahun 2020 adalah 83,53 atau 593,22 km dari total panjang 710,19 km, naik dibandingkan capaian tahun lalu Sedangkan target akhir kondisi baik Jalan Kabupaten lima tahun ke depan menurut RENSTRA 2017-2022 adalah 73, jadi terhadap target akhir ini tercapai 114,42, kedepannya masih perlu kerja keras untuk meningkatkan kondisi jalan menjadi semua baik.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian **Sasaran 1**, adalah sebesar Rp. 59.105.878.990,- dengan realisasi Rp. 57.186.782.197,- (96,75) yaitu jumlah total anggaran untuk penanganan Jalan dan Jembatan Kabupaten baik yang bersumber dari APBD Kabupaten dan APBD Provinsi.

Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja yaitu :

1. Program Pembangunan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
 - 1.1. Kegiatan Peningkatan Jalan dan Jembatan ;
 - 1.2. Kegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

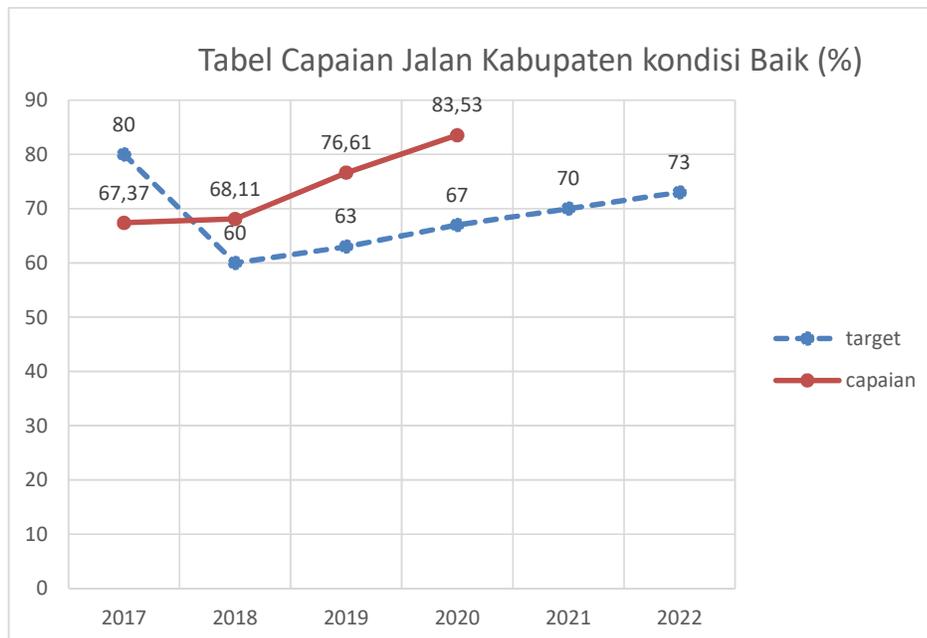
Gambar 3.10

Peningkatan Jalan Ketanggungan - Dukuhtengah, Kec. Ketanggungan



Grafik 3.10

Capaian Jalan Kabupaten Kondisi Baik



Sasaran Strategis 2.2 Meningkatnya cakupan air minum layak untuk masyarakat

Sasaran Strategis Meningkatkan cakupan air minum layak untuk masyarakat mempunyai 1 Indikator yaitu Cakupan Akses Air Bersih

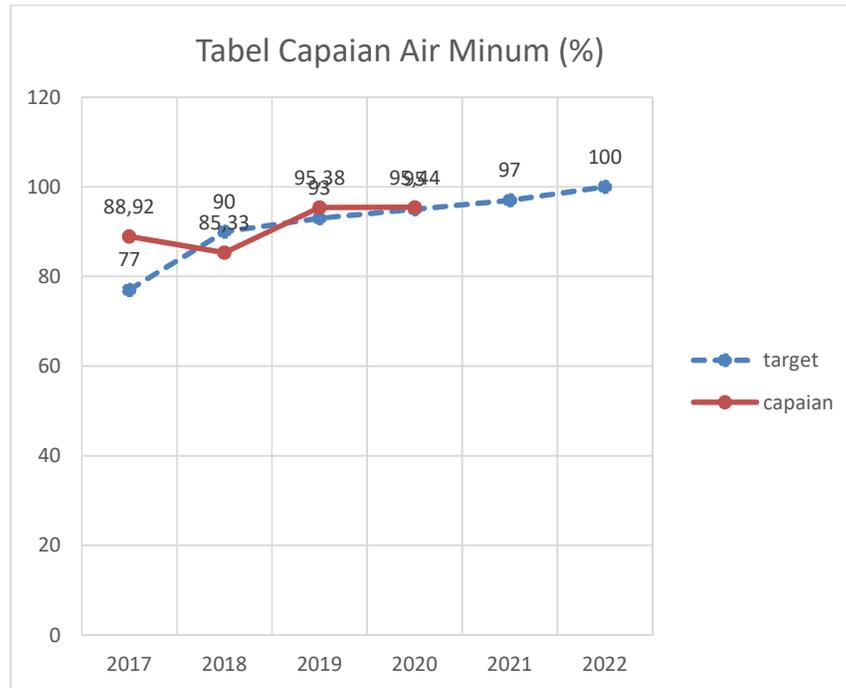
Tabel 3.11
Capaian Kinerja Cakupan Akses Air Bersih

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2019	Target	Realisasi	Capaian Th. 2020	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Cakupan Akses Air Bersih	%	102,56	89.55	95.44	106.58	90.35

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa untuk realisasi capaian **Persentase cakupan akses Air Bersih** adalah 106.58 angka ini melampaui target yang ditentukan di tahun 2020 yaitu 89.55. Angka capaian ini naik dibandingkan dengan tahun lalu (2019).

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes bersama instansi/ OPD lain yang tergabung dalam tim Pokja AMPL (Air minum dan Penyehatan Lingkungan) adalah salah satu perangkat daerah yang ikut dalam mewujudkan semua masyarakat untuk mendapat akses air bersih layak khususnya dalam membangun sarana dan prasarana air bersih perpipaan, sedangkan untuk yang non perpipaan diampu oleh instansi lain. Untuk jaringan air bersih perpipaan juga bekerja sama dengan PDAM dan PAMSIMAS.

Grafik 3.11
Capaian Air Minum



Gambar 3.11
Pembangunan Jaringan Air Minum
Di Desa Plompong Kecamatan Sirampog



Sasaran Strategis 2.3 Meningkatnya Cakupan Sanitasi

Sasaran Strategis Meningkatkan cakupan sanitasi mempunyai 3 (tiga) Indikator yaitu Cakupan akses jamban, Persentase kawasan bebas banjir perkotaan, Persentase penanganan persampahan.

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Meningkatnya Cakupan Sanitasi

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2019	Target	Realisasi	Capaian Th. 2020	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Cakupan akses jamban	%	120.79	72.8	110.57	151.88	75.74
Kawasan bebas banjir perkotaan	%	106,38	96	95	98.96	100
Penanganan persampahan	%	68,87	24.66	17.45	70.76	32.66
Rata-rata		98,41			107,2	

Secara Garis besar, Capaian Kinerja pada sasaran strategis Meningkatkan Cakupan Sanitasi dilihat dari rata-rata capaian indikator kerjanya adalah dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Dari data Kawasan bebas banjir perkotaan menunjukkan bahwa untuk pada Tahun 2020 persentase kawasan bebas genangan karena air hujan adalah 95, intensitas hujan yang cukup tinggi di tahun 2020 menyebabkan ada beberapa titik di kawasan kota Brebes yang terjadi genangan disebabkan karena aliran air hujan yang tidak lancar

Analisis atas capaian Indikator kinerja bidang Drainase. Kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kab. Brebes adalah disamping meningkatkan kondisi saluran drainase juga pemeliharaan saluran drainase yang mengalami kerusakan serta membentuk tim “Dalban” atau Pengendali Banjir yaitu tim yang selalu siap siaga jika

hujan deras dan terjadi genangan di kawasan kota Brebes akan segera bertindak untuk menanganinya.

Kinerja penanganan/pengelolaan persampahan mengalami dengan indikator Persentase penanganan persampahan dan target untuk Tahun 2020 sebesar 24,66, telah terealisasi sebesar 17,45 atau sebesar 70,76 untuk pencapaian kinerjanya, dikategorikan Sedang. Pencapaian kinerja untuk pengelolaan sampah masih belum mencapai target karena :

- a. Terbatasnya armada pengangkut sampah dan tenaga kerja, kondisi Tahun 2020 jumlah Truk 24 unit dan tenaga kerja 253 orang;
- b. Adanya pengurangan anggaran dibidang pengelolaan sampah sehingga mengurangi jadwal pengambilan sampah, yang tadinya 3 shift menjadi 2 shift;
- c. Alat berat yang berjumlah 2 unit mengalami kerusakan 1 unit, sudah dibetulkan tetapi masih butuh biaya, yang akan dianggarkan pada Tahun 2021;
- d. Perbandingan jumlah sampah yang dihasilkan dalam satu tahun sesuai perhitungan :
 - Timbulan sampah berdasarkan jumlah penduduk Tahun 2020 sebesar \pm 950 ton/hari, sedangkan sampah yang dapat terangkut ke TPA baru sebesar \pm 150 Ton/hari dan yang dikelola masyarakat sebesar + 190 ton/hari, berarti masih ada sisa sampah yang belum terangkut + 610 ton/hari.
 - Kondisi ideal untuk dapat mengatasi seluruh permasalahan sampah di Kabupaten Brebes diperlukan armada sekitar 150 truk dan 900 orang tenaga pengelola sampah.

Sasaran Strategis 2.4 **Meningkatnya Cakupan Irigasi dalam Kondisi Baik**

Sasaran Strategis Meningkatkan cakupan irigasi dalam kondisi baik mempunyai 1 (satu) Indikator yaitu Rasio jaringan irigasi baik.

Tabel. 3.13
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Cakupan Irigasi dalam Kondisi Baik

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2019	Target	Realisasi	Capaian Th. 2020	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Rasio jaringan irigasi baik	%	102,40	63.06	73	115.76	65.04

Capaian dari Sasaran Strategis Meningkatnya cakupan irigasi dalam kondisi baik, dapat dicapai yaitu sebesar 115,76 atau tercapai dengan kategori **Sangat Berhasil** dan melampaui target yang ditetapkan. Sasaran tersebut diukur keberhasilannya dengan :

- a. Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada system irigasi yang ada
- b. Jumlah aparatur, dan masyarakat petani yang mandiri dan berwawasan dalam pengelolaan jaringan irigasi dan air baku
- c. Prosentase panjang sungai/saluran pembuang yang berfungsi optimal

Tahun 2020 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Kabupaten Brebes menetapkan sasaran strategisnya berupa terpenuhinya kebutuhan air irigasi bagi areal sawah dan meningkatkan pengamanan kawasan areal pertanian dari bahaya banjir yang disebabkan oleh aliran sungai dengan indikator persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada system irigasi yang ada, target tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada system irigasi yang ada sebesar 73 dan di akhir tahun 2020 realisasinya sebesar 73 atau sebesar 100 dari target.

Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja sasaran diatas adalah Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Air Baku dan Jaringan Pengairan Lainnya dengan kegiatan meliputi :

- a. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Air Baku
- b. Eksploitasi, Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Air Baku.
- c. Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Air Baku (DAK)

Sasaran Strategis 2.5
Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat

Sasaran Strategis Meningkatkan penyediaan Rumah Layak Huni bagi masyarakat mempunyai 1 (satu) Indikator yaitu Rasio rumah layak huni.

Tabel. 3.14
Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2019	Target	Realisasi	Capaian Th. 2020	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Rasio Rumah Layak Huni	%	65,87	86.58	100	115.50	88.24

Angka realisasi diatas didapat dari Jumlah realisasi rumah tidak layak huni yang tertangani di Kabupaten Brebes tahun 2020 sejumlah 1.421 unit rumah dibanding dengan target meningkatnya penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat yang berjumlah 1.421 unit. Sehingga rumus diatas didapat data realisasi kinerja untuk Rasio rumah layak huni sebesar 100.

Standar yang digunakan dalam Sasaran ini adalah UU Nomor I Tahun 2011 Tentang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Brebes telah melaksanakan intervensi terhadap rumah

tidak layak huni sampai dengan tahun 2020 sebanyak 13.575 unit, dan untuk keberhasilan capaian indikator sasaran 1 didukung oleh adanya Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), APBN, APBD, CSR dan Dana Desa.

Faktor – faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya capaian indikator tersebut yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal (Kewenangan OPD) diantaranya pendanaan APBD kabupaten yang masih terbatas, terbatasnya tanah milik Pemda, belum adanya dokumen rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (RP3KP), data jumlah rumah yang tidak valid, banyaknya perumahan yang fasum dan fasosnya yang belum berterimakasih pada Pemda, dan untuk faktor eksternal (Kewenangan diluar OPD) yaitu harga tanah yang mahal, tingginya angka kemiskinan di kabupaten brebes, akses masyarakat yang terbatas terhadap pembayaran perumahan, serta banyaknya RTLH yang harus ditangani.

Pencapaian sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tidak terlepas dari dukungan sumber daya organisasi. Sumber daya organisasi dibedakan menjadi tiga yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana serta anggaran.

Sasaran Strategis 2.5 Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh

Sasaran Strategis Menurunnya Kawasan Permukiman Kumuh memiliki 1 (satu) Indikator yaitu Persentase permukiman kumuh.

Tabel. 3.15
Menurunnya Kawasan Lingkungan Pemukiman Kumuh

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2019	Target	Realisasi	Capaian Th. 2020	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Permukiman Kumuh	%	30,99	37.27	29.85	80.09	0

Capaian dari Sasaran Strategis Persentase Permukiman Kumuh dapat dicapai yaitu sebesar 80,09, kurang tercapainya sasaran ke 2 ini dikarenakan intervensi yang dilaksanakan di lokus Non KOTAKU hanya menurunkan bobot kekumuhan tetapi tidak mengurangi luasan kawasan kumuh dilokus tersebut. Contohnya, di Desa Ciampel Kecamatan Kersana, dimana intervensi yang dilaksanakan yaitu pekerjaan drainase dan jalan lingkungan, sedangkan permasalahan kumuh dalam bobot tertinggi adalah akses air minum dan pengelolaan sampah, sehingga hanya menurunkan bobot kekumuhan tetapi tidak mengurangi luasan kawasan kumuh di lokus tersebut.

Permen PUPR Nomor 2/PRT/2016 menyebutkan bahwa dilingkungan perumahan rakyat dan kawasan permukiman terdapat tujuh aspek kekumuhan, yaitu Kondisi bangunan, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum / air bersih, sanitasi layak, pengelolaan sampah, dan pengamanan bahaya kebakaran.

Faktor – faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya capaian indikator tersebut yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal (Kewenangan OPD) yaitu keterbatasan kewenangan OPD dalam menangani kawasan permukiman kumuh yang ada di pedesaan dan untuk faktor eksternal (Kewenangan diluar OPD) yaitu penentuan lokasi kegiatan tidak sepenuhnya ditentukan oleh OPD.

Sasaran Strategis 2.6 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup memiliki Indikator yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; sedangkan indeks kualitas lingkungan hidup terdiri ditentukan dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan.

Tabel 3.16
Capaian Kinerja Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2019	Target	Realisasi	Capaian Th. 2020	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup						
- Indeks Kualitas Air (pencemaran air)	Ha	163.70	36.3	30	82.64	49
- Indeks Kualitas Udara (pencemaran udara)	Ha	157,60	83.1	82.62	99.42	85.70
- Indeks Tutupan Lahan (lahan kritis yang tertangani)	Ha	89,97	68	67.49	99.25	69.00
Rata-rata		137,09			93,77	

Pengukuran kinerja sasaran strategis diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kualitas air dapat digambarkan bahwa pencemaran air dengan indikator persentase pencemaran air (BOD, COD, TSS, TDS) yang mana memiliki target di tahun 2019 adalah 30 dan dicapai hasil pencemaran air hanya 10,89 artinya capaian Kualitas air melebihi target yang ditentukan, sehingga prosentase capaian kinerja 163,70.
2. Kualitas udara didukung/ dapat dilihat dari pencemaran udara yang dilihat dari kandungan Hidro Carbon (HC) pada udara ambient dengan target 60. Untuk tahun 2019 target tersebut dicapai pencemaran (kandungan HC) 25,46, sehingga prosentase capaian kinerja mencapai 157,60.
3. Indeks tutupan lahan diartikan dengan pengurangan lahan kritis (luas lahan kritis yang tertangani), ditargetkan di tahun 2019 adalah 30 Ha. tetapi yang dapat tertangani 26,99 Ha. sehingga capaian kinerja 89,97.

Secara umum, capaian indikator kinerja pada sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2019 dapat dicapai 137,09 dengan kategori Sangat Tinggi.

Misi III : Meningkatkan pengembangan pertanian, ekonomi kerakyatan dengan memperkuat inovasi daerah dan investasi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berbasis kearifan lokal.

**Sasaran Strategis 3.1
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian**

Sasaran Strategis Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian memiliki 1 (satu) Indikator yaitu Kontribusi sektor pertanian.

**Tabel 3.17
Capaian Kinerja Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian**

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2019	Target	Realisasi	Capaian Th. 2020	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Kontribusi Sektor Pertanian	Rupiah (miliar)	83,04	19,830.942	17,620.682	88,85	22,704.445

Dari tabel diatas disampaikan bahwa capaian indikator kinerja telah mencapai target yang dapat dikategorikan berhasil. Jika dibandingkan tahun sebelumnya (2019) hanya tercapai 83,04. Pada dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Brebes pencapaian tujuan tersebut, telah ditetapkan tiga indikator utama sebagai tolok ukur. Adapun pengukuran ke tiga indikator tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Capaian Kinerja Indikator Produksi Pertanian
dan Ketahanan Pangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Th. 2019
1.	Meningkatkan Produksi Produk Pertanian Utama:					
	a. Padi	Ton	611.568	602.920	98,59	92,24
	b. Jagung	Ton	140.751	167.978	119,34	94,25
	c. Bawang merah	Ton	299.992	395.571	131,86	103,80
2.	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat:					
	a. Skor Pola Pangan Harapan (Susenas)	Nilai	75,9	88,2	116,21	103,69
	b. Skor Pola Pangan Harapan (Reguler)	Nilai	88,1	77,5	87,97	103,38

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dari 3 (tiga) indikator kinerja sebagai tolok ukurnya tergambar bahwa secara umum capaian kinerjanya masuk kategori Sangat Baik.

Produksi Produk Pertanian Utama komoditas padi, jagung dan bawang merah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Produksi padi tahun 2020 sebesar 602.920 ton, atau terealisasi sebesar 98,59 dari target dalam Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2020 sebesar 611.568 ton, pencapaian tahun 2020 dibanding tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 6,80 (produksi padi tahun 2019 sebesar 557.401 ton capaiannya 91,79). Kenaikan produksi dengan tahun sebelumnya 8,16. Meskipun tidak bisa memenuhi target dalam Renstra untuk tahun 2020 akan tetapi produktivitas padi mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena mulai tercukupinya air, berkurangnya serangan OPT. Sedangkan masih tidak tercapainya target produksi padi tahun 2020 disebabkan

adanya wabah pandemi virus covid -19 menyebabkan terjadinya refocusing anggaran, sehingga anggaran yang sedianya untuk meningkatkan produktivitas hasil panen melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur dan pendukung lain menjadi tidak terlaksana seluruhnya

2. Produksi jagung tahun 2020 sebesar 167.978 ton, atau terealisasi sebesar 119,34 dari target dalam Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2020 sebesar 140.751 ton, pencapaian tahun 2020 dibanding tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 18,87 (produksi tahun 2019 sebesar 138.804 ton capaiannya 100,47). Kenaikan produksi sebesar 21,2. Kenaikan produksi jagung tahun 2020 disebabkan lahan-lahan pertanian bukan sawah/ladang dilakukan optimasi pemanfaatan dengan didorong bantuan benih jagung hibrida penggunaan benih jagung hbrida yang luas mampu menaikkan produktivitas jagung menjadi 6,52 ton/ha naik di banding 2019 yang sebesar 6,42 ton/ha, Antisipasi dampak perubahan iklim/kekeringan lahan sawah yang tadah hujan di tanami jagung.
3. Produksi Bawang merah tahun 2020 sebesar 395.571 ton, atau terealisasi sebesar 131,86 dari target dalam Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2020 sebesar 299.992 ton, pencapaian tahun 2020 dibanding tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 31,39 (produksi padi tahun 2019 sebesar 307.828 ton capainnya 105,54). Kenaikan produksi dari tahun sebelumnya 28,07. Kenaikan produksi tahun 2020 disebabkan adanya ketercukupan air dibanding tahun sebelumnya yang mengalami kemarau panjang. Dan lebih sedikitnya serangan hama dan organisme perusak tanaman bawang.

Dalam hal perikanan, Dinas Perikanan Kabupaten Brebes telah melaksanakan Program dan Kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya, yakni Kontribusi Sektor Perikanan. Secara umum capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.19
Capaian Kinerja Indikator Kontribusi Sektor Perikanan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	(%) Capaian 2020	(%) Capaian Th. 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya Kontribusi Sektor Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap di Laut (Ton)	3.420,00	3.827,11	111,90	125,37
	Produksi Perikanan Tangkap di Waduk (Ton)	128,00	314,53	245,73	190,32
	Produksi Perikanan Budidaya Air Payau (Ton)	68.006,00	69.173,28	101,72	108,54
	Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (Ton)	3.037,00	2.491,30	82,03	89,25
	Produksi Garam Tambak/ Krosok (Ton)	59.000,00	2.410,03	4,08	86,97

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatkan Kontribusi Sektor Perikanan dapat tercapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja Meningkatkan Kontribusi Sektor Perikanan diukur dari lima indikator, yaitu: (1) Produksi Perikanan Tangkap di Laut (Ton), (2) Produksi Perikanan Tangkap di Waduk (Ton), (3) Produksi Perikanan Budidaya Air Payau (Ton), (4) Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar (Ton) dan (5) Produksi Garam Tambak/ Krosok (Ton), rata rata tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, kecuali Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar dan Produksi Garam.

Penyebab belum tercapainya produksi garam adalah karena pada tahun 2020 bisa dikatakan musim kemarau basah sehingga intensitas cahaya matahari belum maksimal untuk memproduksi garam dalam jumlah yang banyak dan sebagian tambak Garam masih digunakan untuk budidaya bandeng.

Sedangkan penyebab belum tercapainya produksi perikanan budidaya Air Tawar karena musim kemarau panjang menyebabkan susah air sehingga produksi menurun.

Capaian kinerja pada sasaran kontribusi sektor perikanan tahun 2020 apabila dibandingkan dengan tahun 2019, mengalami **penurunan**, karena untuk tahun 2020 tercapai **109,09** sedangkan tahun 2019 tercapai **120,09**.

Sasaran Strategis 3.2 **Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri Pengolahan**

Sasaran Strategis Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan memiliki 1 (satu) Indikator yaitu Kontribusi sektor industri pengolahan. Didalamnya didukung oleh meningkatnya sektor industri kecil dan menengah. Capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.20
Capaian Kinerja Indikator Kontribusi Sektor Industri

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2019	Target	Realisasi	Capaian Th. 2020	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Kontribusi Sektor Industri	Rupiah (miliar)	100	6,067.410	7,928.862	130.68	6,333.09

Dari tabel diatas disampaikan bahwa capaian kinerja dari indikator kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan. Jika dibandingkan tahun sebelumnya (2019) yang tercapai 100,00. Kenaikan capaian dikarenakan mulai banyaknya investasi yang ada di Kabupaten Brebes. Selain itu, adanya langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan ijin usaha bagi industri kecil dan menengah;
2. Memberikan pembinaan bagi industri kecil dan menengah dalam memperkuat kluster industri dan melakukan pelatihan untuk meningkatkan ketrampilan, serta magang bagi para pelaku IKM di

beberapa daerah yang mempunyai keunggulan atas sebuah produk IKM;

3. Memberikan fasilitasi kemitraan kerjasama bagi industri mikro, kecil dan menengah dengan pihak swasta;
4. Membantu industri kecil dan menengah dalam pengujian laboratorium atas produk yang dihasilkannya sehingga memenuhi standar yang dipersyaratkan bagi produk yang bersangkutan. Selain itu juga memberikan kemudahan untuk mendapatkan HAKI, Label Halal, PiRT.

Sasaran Strategis 3.3 **Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan**

Pada sasaran strategis Meningkatkan Kontribusi Sektor Perdagangan, memiliki Indikator Kinerja Kontribusi Sektor Perdagangan. Sektor Perdagangan mempengaruhi pembangunan daerah dalam hal perekonomian dan diharapkan dapat mempengaruhi laju inflasi yang tentunya masih sesuai target pembangunan, tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah.

Tabel 3.21
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kontribusi Sektor Perdagangan

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2019	Target	Realisasi	Capaian Th. 2020	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Kontribusi Sektor Perdagangan	Rupiah (miliar)	125.24	6,208.182	7,569.499	121.93	6,336.182

Dari tabel diatas, menggambarkan bahwa capaian kinerja sektor perdagangan dapat tercapai dan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal tersebut merupakan salah satu imbas dari meningkatnya investasi yang masuk di Kabupaten Brebes, sehingga sektor perdagangan juga dapat tumbuh/ berkembang.

Sasaran Strategis 3.4 **Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata**

Pada sasaran strategis Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata, memiliki Indikator Kinerja yaitu Kontribusi sektor pariwisata.

Tabel 3.22
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2019	Target	Realisasi	Capaian Th. 2020	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Kontribusi Sektor Pariwisata	Rupiah (miliar)	90.49	2,254.189	977.783	43.38	2,851.55

Dari tabel diatas, menggambarkan bahwa capaian kinerja sektor pariwisata tergolong rendah di bandingkan target yang telah ditetapkan. Hal tersebut merupakan salah satu imbas dari meningkatnya adanya pandemi Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya wisatawan.

Pada sasaran strategis Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata, memiliki Indikator Kinerja yaitu Kontribusi sektor pariwisata.

Sasaran Strategis 3.5 **Meningkatnya Laju Investasi Daerah Dengan Memperhatikan Ketersediaan Sumberdaya Alam, Daya Dukung, dan Daya Tampung Lingkungan Hidup**

Sasaran strategis Meningkatkan Laju Investasi Daerah Dengan Memperhatikan Ketersediaan Sumberdaya Alam, Daya Dukung, dan

Daya Tampung Lingkungan Hidup memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Laju kenaikan investasi dan Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN).

Investasi merupakan salah satu komponen dari pendapatan daerah yang dikenal sebagai PDRB, dua hal ini memiliki korelasi positif, jika investasi baik maka PDRB akan naik, begitu pula sebaliknya. Namun demikian investasi bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Dengan ditetapkannya Kabupaten Brebes sebagai kawasan industri untuk menopang pertumbuhan nasional, kebijakan pusat tentu harus dibarengi dengan pelaksanaan teknis dan kebijakan daerah yang tepat salah satunya adalah dengan kemudahan izin inestasi dan durasi perizinan yang cepat serta penataan ruang dengan penetapan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) sebagai kepastian peruntukan lahan untuk investasi.

Tabel 3.23
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Laju Investasi Daerah Dengan Memperhatikan
Ketersediaan SumberDaya Alam, Daya Dukung, dan Daya Tampung
Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2019	Target	Realisasi	Capaian Th. 2020	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Laju kenaikan investasi		120,00	2	2.28	114.00	2
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA/PMDN)	Rupiah (Milyar)	124,10	1,357	5,826	429.33	1,411
Rata-rata		122,05			271,66	

Berdasarkan renstra 2017-2022 Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah meningkatnya laju investasi daerah dengan indikator sebagai berikut:

a. Laju kenaikan investasi

Laju kenaikan investasi pada tahun 2020 sebesar 2,28, atau terealisasi sebesar 114,01 dari target dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020 sebesar 2.

b. Jumlah nilai investasi yang berskala nasional (PMA/PMDN)

Jumlah nilai investasi yang berskala nasional pada tahun 2020 sebesar 1.090 milyar rupiah, atau terealisasi sebesar 80,31 dari target dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2020 sebesar 1.357 milyar rupiah.

Sasaran Strategis 3.6
Meningkatnya Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Pada sasaran strategis Meningkatkan Penguatan Sistem Inovasi Daerah, memiliki Indikator Kinerja yaitu Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan.

Tabel 3.24
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Penguatan Sistem Inovasi Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2019	Target	Realisasi	Capaian Th. 2020	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan	%	100	60	40	66.67	100

Capaian Kinerja Meningkatnya kebijakan hasil Kelitbangan yang diimplementasikan, yaitu Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan. Realisasi capaian kinerja tercapai 66.67, dengan predikat baik.

Sasaran Strategis 3.7 Meningkatnya Angkatan Kerja yang Bekerja

Sasaran strategis Meningkatnya Angkatan Kerja yang Bekerja, memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Tingkat partisipasi angkatan kerja dan Rasio penduduk yang bekerja.

Tabel 3.25
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Angkatan Kerja yang Bekerja

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2019	Target	Realisasi	Capaian Th. 2020	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	118,43	69.25	66.65	96.25	72.15
Rasio penduduk yang bekerja	%	97,77	64.85	61.03	94.11	67.47
Rata-rata		108,10			95,18	

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran **“Tingkat Pengangguran Terbuka dan Rasio penduduk yang Bekerja”**, dapat diketahui dari 2 (dua) indikator hampir seluruh capaian kinerja memenuhi target. Namun data Pengangguran Terbuka dan Rasio penduduk yang Bekerja diambilkan dari Buku Brebes Dalam Angka 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang berisi tentang kondisi Kabupaten Brebes pada Tahun 2019 sehingga pengukuran kinerja belum optimal. Untuk Buku Kabupaten Brebes Dalam Angka 2020 yang memuat kondisi Kabupaten Brebes Tahun 2020 di keluarkan pada pertengahan tahun 2021.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 2, rata-rata capaian kinerja Tahun 2020 mengalami **penurunan** dibanding Tahun 2019. Tahun 2020 tercapai 105,94, sedangkan Tahun 2019 tercapai 108.10 Namun walaupun terdapat penurunan capaian kinerja, kondisi yang terjadi antara tahun 2019 dan 2020 hampir sama :

1. Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2020 sebesar 7,43 sama dengan tahun 2019, walaupun mengalami penurunan kinerja namun selisih tidak mencapai 1 sehingga dapat diartikan bahwa setiap 100 orang penduduk usia kerja terdapat 7 orang yang selama seminggu terakhir tidak bekerja pada saat diadakan survey oleh Badan Pusat Statistik.
2. Tingkat Pengangguran terbuka tidak serta merta menunjukkan kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja karena penyerapan angkatan kerja dipengaruhi berbagai sektor yang mempengaruhi perekonomian.

Adapun alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

1. Memperluas kesempatan kerja bagi pencari kerja dengan mengoptimalkan peran Bursa Kerja Khusus (BKK) yang ada di sekolah – sekolah Kejuruan dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS).
2. Memberikan fasilitasi/kemudahan bagikepada para pencari kerja (khususnya yang akan bekerja ke luar negeri), melalui Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA).
4. Berupaya memperbanyak pelatihan berbasis kompetensi, berbasis kewirausahaan, dan berbasis masyarakat bagi para pencari kerja, baik melalui anggaran dari kementerian, pemerintah propinsi maupun dari anggaran pemerintah daerah.
5. Melakukan Pembinaan – Pembinaan kepada Perusahaan dan Pekerja agar terjalin komunikasi yang baik antara perusahaan dan pekerja.

MISI IV : Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang profesional, efektif dan efisien, serta menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban daerah

**Sasaran Strategis 4.1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**

Sasaran strategis Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, memiliki Indikator Kinerja yaitu Nilai SKM (Survey Kepuasan Masyarakat). Hal ini dapat menunjukkan kualitas pelayanan dari unit-unit penyelenggara pelayanan publik yang ada di pemerintah daerah kabupaten Brebes.

Tabel 3.26
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2019	Target	Realisasi	Capaian Th. 2020	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Angka (indeks)	101.77	77.52	79.39	102.41	77.98

Berdasarkan hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan di Unit-unit Pelayanan Publik pada beberapa Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Brebes Tahun 2020 sebesar 79,39 atau masuk kategori “Baik”. Hasil survey dari 61 (enam puluh satu) Unit penyelenggara pelayanan yang melakukan survey, sebagian besar mempunyai nilai Indeks Kepuasan Masyarakat dengan predikat “Baik”, secara umum pelayanan masyarakat telah dilaksanakan dengan baik.

Sasaran Strategis 4.2

Membaiknya Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Sasaran strategis Membaiknya Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja yaitu Indeks Nilai LPPD; dan Opini BPK.

Tabel 3.27
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Membaiknya Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2019	Target	Realisasi	Capaian Th. 2020	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Indeks LPPD	Indeks	100	Sangat Tinggi	-	-	Tinggi
Opini BPK		WTP	WTP	-	-	WTP

Nilai LPPD tahun 2020 masih menunggu hasil dari Kementerian Dalam Negeri. Opini BPK untuk tahun 2020 masih menunggu hasil audit BPK yang akan dikeluarkan dalam bulan Juni 2021.

Nilai Opini BPK terhadap laporan Keuangan Daerah merupakan salahsatu indikator pada Sasaran Strategis Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih. Penilaian Keuangan ini dilakukan oleh pihak eksternal dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan komponen penting untuk menilai sejauhmana penilaian yang obyektif terhadap akuntabilitas dan kinerja daerah dari aspek pengelolaan keuangannya.

Sasaran Strategis 4.3 Meningkatnya Kualitas Aparatur yang Profesional dan Berkompeten

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- d. Kualifikasi memiliki bobot 25
- e. Kompetensi memiliki bobot 40
- f. Kinerja memiliki bobot 30
- g. Disiplin memiliki bobot 5

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

- a. Nilai 91 – 100 berkategori Sangat Tinggi;
- b. Nilai 81 – 90 berkategori Tinggi;
- c. Nilai 71 – 80 berkategori Sedang;
- d. Nilai 61 – 70 berkategori Rendah; dan
- e. Nilai 0 – 60 berkategori Sangat Rendah.

Penilaian Indeks Profesionalitas ASN di Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes dapat disampaikan sebagai berikut:

Tabel 3.28
Capaian Kinerja Meningkatnya Kualitas Aparatur yang Profesional dan Berkompeten

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2019	Target	Realisasi	Capaian Th. 2020	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Indeks Profesionalitas ASN	Angka (indeks)	117,32	63.11	106.2	168.28	62.41

Berdasarkan data diatas, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja pada sasaran strategis meningkatnya kualitas Aparatur Sipil Negara pada tahun 2020 telah melampaui dari target sebesar 62, 41 dicapai 106,2 (kategori sangat tinggi) sehingga mendapatkan persentase capaian 117,32 dengan kategori **Sangat Baik**.

Sasaran Strategis 4.4 Meningkatnya Kualitas Kelitbangan

Pada sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Kelitbangan, memiliki Indikator Kinerja yaitu Persentase rekomendasi kebijakan hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah.

Tabel 3.29
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Kelitbangan

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2019	Target	Realisasi	Capaian Th. 2020	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Persentase rekomendasi kebijakan hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah	%	100	60	100	166.67	100

Capaian Kinerja Meningkatnya kebijakan hasil Kelitbangan yang diimplementasikan, yaitu Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan. Realisasi capaian kinerja tercapai 166,67, dengan predikat baik. Capaian kinerja tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019.

Sasaran Strategis 4.5 Meningkatnya Keamanan, Ketentraman, dan Keindahan Serta Kenyamanan Lingkungan Masyarakat

Sasaran strategis Meningkatkan keamanan, ketentraman, dan keindahan serta kenyamanan lingkungan masyarakat, memiliki Indikator Kinerja yaitu Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, dan keindahan).

Tabel 3.30
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya keamanan, ketentraman, dan keindahan serta
kenyamanan lingkungan masyarakat

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2019	Target	Realisasi	Capaian Th. 2020	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan)	%	89,96	100	100	100.00	100

Berdasarkan data diatas, dengan melihat skala pengukuran tingkat capaian kinerja Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, dan keindahan) dapat kita ketahui bahwa kegiatan indikator kinerja dapat dikatakan dalam kategori **Baik (100)**.

Dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Brebes selama tahun 2020 dalam rangka memenuhi sasaran strategis organisasi dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Selama 2020 tidak ada demo / unjuk rasa yang disertai dengan tidak anarkis;
2. Bencana banjir dan longsor cepat ditangani oleh Satlinmas;
3. Bencana kebakaran dapat diatasi dengan cepat.

MISI V : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Menjadi Desa Yang Maju Dan Mandiri

Pada Misi Memantapkan tata kelola pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi desa yang maju dan mandiri ini terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 3 (tiga) Indikator Kinerja. Dalam hal ini, Perangkat Daerah yang mengampu/ bertanggung jawab dalam Misi ini adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tabel 3.31
Capaian Kinerja Misi Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Menjadi Desa Yang Maju Dan Mandiri

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2019	Target	Realisasi	Capaian Th. 2020	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7	8
Desa mampu menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu	Persentase desa yang menyusun RPJMDes dan RKPDes tepat waktu	%	275,55	51.36	51.36	100.00	100
Desa mampu menyusun APBDDes tepat waktu	Persentase desa yang menyusun APBDDes tepat waktu	%	275,55	51.36	51.36	100.00	100
Desa yang memiliki BUMDes	Rasio desa yang memiliki BUMDes	%	275,55	51.36	51.36	100.00	100
			275,55			100.00	

Hasil pencapaian dari pengukuran kinerja diatas prosentase rata – rata capaiannya 100 yang dikategorikan **sangat baik**.

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran strategis tersebut tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pada tahun anggaran 2019 yang memadai, selaras dengan perencanaan dan targer di masing-masing kegiatan. Adapun permasalahan yang ada dalam pencapaian target kinerja antara lain sebagai berikut:

1. Adanya prasarana di perdesaan yang kurang memadai, meskipun setiap desa memiliki sumber daya yang potensial untuk dikembangkan untuk mendukung pemberdayaan berbasis masyarakat.
2. Belum optimalnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan desa, serta masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Masih rendahnya tingkat swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan.
3. Usaha ekonomi produktif belum dapat berkembang sesuai harapan, hal ini dapat dilihat dari jumlah lembaga keuangan mikro yang tidak aktif dan tidak memberikan kontribusi dalam penyediaan atau memfasilitasi modal usaha.
4. Peningkatan sarana dan prasarana untuk masyarakat miskin di perdesaan masih rendah, disebabkan masih minimnya anggaran yang dialokasikan untuk sasaran tersebut.

MISI VI : Menciptakan Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender, serta pemenuhan hak anak, dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, serta mewujudkan perlindungan sosial.

Sasaran Strategis 6.1

Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, dan Perlindungan Perempuan

Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, dan Perlindungan Perempuan memiliki 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu :

1. Harapan Lama Sekolah
2. Rata-rata Lama Sekolah
3. Usia Harapan Hidup
4. Pengeluaran per-Kapita yang disesuaikan (PPP)
5. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

6. Proporsi perempuan di lembaga pemerintah (ASN)
7. Persentase penanganan korban KDRT

Pada sasaran ini, indikator Harapan Lama Sekolah; Rata-rata Lama Sekolah; dan Usia Harapan Hidup telah dibahas pada Misi ke-I Sasaran strategis Meningkatnya akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan Sasaran strategis Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Tabel 3.32
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, dan Perlindungan
Perempuan

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2019	Target	Realisasi	Capaian Th. 2020	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Pengeluaran per-kapita yang disesuaikan (PPP)	Rp	159,57	6436	10058	156.28	6,474
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan	%	109,34	2.12	2.12	100.00	2.33
Proporsi perempuan di lembaga pemerintahan (ASN)	%	170,03	28.11	46.86	166.70	29.24
Persentase penanganan korban KDRT	%	100,00	100	100	100.00	100
Rata-rata		134,74			130.74	

Rata - rata dari hasil pengukuran pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, dan Perlindungan Perempuan mencapai 130.74% yang dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Sasaran Strategis 6.2

Meningkatnya Jaminan Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Anak Secara Merata

Pada Sasaran Strategis Meningkatkan Jaminan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak secara Merata memiliki 4 (empat) indikator kinerja yaitu :

1. Prevalensi anak bekerja
2. Rasio perkawinan anak
3. Cakupan anak memiliki akte
4. Persentase penanganan korban kekerasan pada anak

Tabel 3.33
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Jaminan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak secara Merata

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2019	Target	Realisasi	Capaian Th. 2020	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Prevelansi anak bekerja	%	184,00	0.0182	0	200.00	0.0182
Rasio perkawinan anak	%	307,14	0.42	0.014	196.67	0.42
Cakupan anak memiliki akte	%	93,42	93	84	90.32	100
Persentase penanganan korban kekerasan pada anak	%	100	100	100	100.00	100
Rata-rata		171.14			146.75	

Rata - rata dari hasil pengukuran pada Sasaran Strategis Meningkatkan Jaminan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak secara Merata mencapai 146.75 yang dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Sasaran Strategis 6.3 Meningkatnya penanganan PMKS

Pada Sasaran Strategis Meningkatkan penanganan PMKS memiliki 2 (dua) indikator kinerja yaitu Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial dan Persentase PMKS penerima KUBE

Tabel 3.34
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Jaminan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak secara Merata

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Th. 2019	Target	Realisasi	Capaian Th. 2020	Target 2022 Akhir RPJMD
1	2	3	4	5	6	7
Persentase PMKS yang mendapat bantuan sosial	%	122,6	60	100	166.67	80
Persentase PMKS penerima KUBE	%	200	6	6	100.00	8
Rata-rata		161,30			133,33	

Rata – rata dari hasil pengukuran pada Sasaran Strategis Meningkatkan penanganan PMKS mencapai 133,33 yang dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Dari hasil capaian kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2020 secara umum Dinas Sosial Kabupaten Brebes dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2020. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang dittapkan akan dicapai pada tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai.

Keberhasilan pencapaian kinerja sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya Program Peningkatan Pelaksanaan Jaminan dan Rehabilitasi Sosial dan Program Pelayanan Bantuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial serta dilaksanakannya program Program Pelayanan Bantuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial.

D. REALISASI ANGGARAN

Realisasi pendapatan daerah tahun 2020 jika dibandingkan tahun 2019 menunjukkan penurunan. Berdasarkan realisasi pendapatan tahun 2020, secara umum pendapatan daerah dapat tercapai sebesar Rp 3.008.370.717.507,00 dari target sebesar Rp 3.004.837.514.000,00 atau telah melampaui target sebesar Rp. 3.533.203.507,14. Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Brebes dari tahun 2012 – 2020 dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.35
Perkembangan Pendapatan Daerah dari Tahun 2012 - 2020

TAHUN	PENDAPATAN		() REALISASI
	TARGET	REALISASI	
1	2	3	4
2012	1.570.670.462.000,00	1.567.078.034.277,00	99,77
2013	1.758.507.520.000,00	1.781.873.278.077,00	101,33
2014	1.957.064.095.000,00	2.045.064.030.908,00	104,50
2015	2.432.876.271.000,00	2.417.208.946.548,00	99,37
2016	2.785.284.383.000,00	2.572.334.594.631,00	92,35
2017	2.875.777.806.000,00	2.824.292.206.279,58	98,21
2018	2.889.816.641.000,00	2.854.028.069.566,31	98,76
2019	3.127.590.616.000,00	3.317.472.151.930,00	106,07
2020	3.004.837.514.000,00	3.008.370.717.507,00	100,12

Sumber : BPPKAD Kabupaten Brebes

Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan pendapatan daerah secara umum adalah masih rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD dibanding dengan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. Hal ini berakibat pada kondisi daerah dengan ketergantungan pada dana perimbangan dari pemerintah pusat yang masih cukup tinggi.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka upaya yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2020 adalah:

- a. Melakukan pendataan dan putahiran data sumber-sumber PAD.
- b. Melakukan penetapan target pendapatan yang sesuai dengan potensinya.
- c. Mengembangkan dan menggali sumber-sumber PAD.
- d. Meningkatkan kualitas pengelolaan sistem administrasi pendapatan daerah untuk menjamin agar semua pendapatan daerah dapat terkumpul secara optimal dan tidak terjadi kebocoran.
- e. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya.
- f. Meningkatkan kemampuan dan profesionalisme aparat pengelola pendapatan.
- g. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- h. Meningkatkan pemberdayaan aset daerah.
- i. Meningkatkan pola koordinasi internal dan pola koordinasi eksternal dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.
- j. Meningkatkan penyediaan sarana prasarana pendukung meningkatnya PAD.
- k. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

Untuk anggaran belanja daerah Kabupaten Brebes pada APBD Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 3.004.837.514.000,00 dan terealisasi sebesar Rp 2.955.050.373.005,00 atau sebesar 98,34%.

Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2020 adalah berikut:

Tabel 3.36
Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	% Realisasi
4	PENDAPATAN - LRA	3,004,837,514,000.00	3,008,370,717,507.14	100.12
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	363,130,149,000.00	392,541,730,819.14	108.10
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	101,716,500,000.00	108,613,189,681.00	106.78
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	13,144,986,000.00	15,467,594,652.00	117.67
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	9,048,697,000.00	9,142,949,901.00	101.04
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	239,219,966,000.00	259,317,996,585.14	108.40
4 . 2	DANA PERIMBANGAN - LRA	1,735,149,441,000.00	1,708,279,450,821.00	98.45
4 . 2 . 1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak – LRA	40,148,342,000.00	37,748,428,131.00	94.02
4 . 2 . 2	Dana Alokasi Umum – LRA	1,261,293,035,000.00	1,241,906,073,000.00	98.46
4 . 2 . 3	Dana Alokasi Khusus - LRA	433,708,064,000.00	428,624,949,690.00	98.83
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	906,557,924,000.00	907,549,535,867.00	100.11
4 . 3 . 1	Pendapatan Hibah – LRA	194,939,920,000.00	194,798,230,000.00	99.93
4 . 3 . 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	178,385,500,000.00	181,020,663,531.00	101.48
4 . 3 . 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	40,754,000,000.00	39,252,138,336.00	96.31
4 . 3 . 7	Dana Desa - LRA	492,478,504,000.00	492,478,504,000.00	100.00
5	BELANJA	3,132,984,182,000.00	2,955,050,373,005.00	94.32
5 . 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1,821,022,368,000.00	1,728,947,080,959.00	94.94
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	1,010,320,316,000.00	942,700,341,016.00	93.31
5 . 1 . 2	Belanja Bunga	1,750,000,000.00	1,232,296,972.00	70.42
5 . 1 . 4	Belanja Hibah	51,437,856,000.00	49,199,705,200.00	95.65
5 . 1 . 5	Belanja Bantuan Sosial	43,567,400,000.00	38,132,650,000.00	87.53

NO.	URAIAN	ANGGARAN 2020 (Rp)	REALISASI 2020 (Rp)	% Realisasi
5 . 1 . 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	15,304,388,000.00	11,436,066,371.00	74.72
5 . 1 . 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	684,452,408,000.00	683,572,111,000.00	99.87
5 . 1 . 8	Belanja Tidak Terduga	14,190,000,000.00	2,673,910,400.00	18.84
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	1,311,961,814,000.00	1,226,103,292,046.00	93.46
5 . 2 . 1	Belanja Pegawai	81,538,546,000.00	77,537,297,353.00	95.09
5 . 2 . 2	Belanja Barang dan Jasa	770,553,342,190.00	716,009,739,829.00	92.92
5 . 2 . 3	Belanja Modal	459,869,925,810.00	432,556,254,864.00	94.06
	SURPLUS / (DEFISIT)	(128,146,668,000.00)	53,320,344,502.14	-41.61
6	PEMBIAYAAN			
6 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	166,146,668,000.00	166,162,123,044.43	100.01
6 . 1 . 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	166,136,668,000.00	166,136,668,498.43	100.00
6 . 1 . 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	-
6 . 1 . 5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	10,000,000.00	25,454,546.00	254.55
6 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	38,000,000,000.00	38,000,000,000.00	100.00
6 . 2 . 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00	100.00
6 . 2 . 3	Pembayaran Pokok Utang	20,000,000,000.00	20,000,000,000.00	100.00
	PEMBIAYAAN NETTO	128,146,668,000.00	128,162,123,044.43	100.01
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN	0.00	181,482,467,546.57	

Sumber : BPPKAD Kab.Brebes (un-audit)

Secara umum pelaksanaan belanja daerah pada tahun 2020 sudah dapat dilaksanakan dengan baik. Jika dilihat dari realisasi anggaran pada tahun 2020 belanja dapat direalisasikan sebesar 98,34%. Belum optimalnya realisasi tersebut karena ada beberapa kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan tahun 2020 karena proses pelaksanaannya dengan pola multiyears. Dipengaruhi pula adanya efisiensi belanja.

Memperhatikan hal tersebut, maka solusi/ pemecahan masalah yang dilaksanakan adalah perencanaan program dan kegiatan yang lebih akurat, dan peningkatan kesiapan OPD dalam melaksanakan tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan setelah APBD ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan daerah, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Brebes tahun 2020 yang merupakan tahun ke-3 pada RPJMD 2017-2022 dalam pembangunan periode lima tahun berikutnya.

Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan terhadap capaian kinerja pada semua sasaran pembangunan daerah, dengan cara membandingkan capaian setiap indikator kinerja sasaran terhadap target yang telah ditentukan, menunjukkan capaian kinerja pada kategori **Sangat Baik/ Sangat Berhasil**, dengan rata-rata 114,43%. Apabila dirinci atas capaian kinerja pada 27 sasaran strategis dan 45 indikator pembangunan yang ada, capaian kinerja berkategori sangat berhasil sebanyak 35 indikator, berkategori berhasil sebanyak 5 indikator, berkategori cukup berhasil sebanyak 2 indikator, tidak terdapat indikator berkategori kurang berhasil, dan berkategori sangat kurang berhasil 1 indikator, serta 2 ada indikator yang belum keluar hasil penilaiannya.

Hasil capaian kinerja ini tentulah tidak terlepas dari komitmen kepala Perangkat Daerah untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam IKU dan Renstra.

Adanya capaian kinerja sasaran yang belum mencapai 100 (mencapai target) pada tahun 2020 ini menunjukkan masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam mencapai target sasaran secara optimal. Beberapa permasalahan yang telah ditemukan dalam usaha pencapaian target serta solusi pemecahan yang telah dirumuskan, perlu disadari oleh pelaksana kegiatan serta semua stakeholder untuk menjadi masukan dalam menyusun kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di masa yang akan datang sehingga tingkat capaian kinerja pada setiap sasaran pembangunan daerah dapat ditingkatkan, antara lain :

- (1) Perlu adanya system monitoring, evaluasi dan pengendalian capaian kinerja pengendalian capaian kinerja dan pelaporan kinerja yang lebih baik;
- (2) Diperlukan adanya upaya yang keras dalam peningkatan IPM di Kabupaten Brebes dengan sinergitas Perangkat Daerah yang terkait;
- (3) Perlu adanya peningkatan kualitas SDM dan Sistem Pelayanan Publik di berbagai bidang.

Dari segi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Brebes, pada awal tahun 2020 pendapatan sebesar Rp. 3.004.837.514.000,00 dan sampai dengan akhir tahun 2020 telah dibelanjakan sebesar Rp. 2.955.050.373.005,00 (98,34%) sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp. 49.787.140.995,00 (1,66%).

Di era demokrasi, transparansi dan globalisasi saat ini, diperlukan komitmen dan upaya kita bersama untuk melaksanakan reformasi birokrasi. Salah satu upaya adalah dengan terus meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes, maka dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, dari tahun ke tahun perlu senantiasa disempurnakan sehingga LKjIP dapat memberikan informasi capaian kinerja pembangunan daerah setiap tahunnya kepada masyarakat dan pihak-pihak lainnya secara transparan dan akuntabel.

Brebes, Maret 2021

BUPATI BREBES,
IDZA PRIYANTI, SE, MH.